

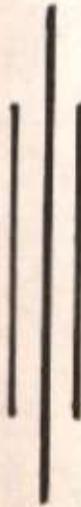


**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

# **JAWABAN EKSEKUTIF**

**TERHADAP**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI  
DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA IV TAHUN 1996 / 1997  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**



**LAMONGAN, 24 MARET 1997**

DAFTAR TABULASI PERTANYAAN FRAKSI – FRAKSI DPRD

No.	P E R M A S A L A H A N		JAWABAN	
	URAIAN	HAL.	SEKTOR	HAL.
	<b>FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA</b>			
1.	Mohon penjelasan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan, baik di Perkotaan maupun di Pedesaan.	6	IX	40
2.	Mengharap pertumbuhan penduduk mencapai zero growth population (pertumbuhan penduduk 0%).	10	XI	48-49
3.	Mohon penjelasan kriteria penduduk miskin untuk mendapat bantuan dana IDT.	17	IX	40-41
4.	Mohon informasi, Pemda Lamongan bekerja sama dengan Pihak Ketiga mana dan proyeknya apa saja untuk meningkatkan PAD.	17	V	21
5.	Mohon penjelasan terhadap kenaikan angka Belanja Pegawai apakah sudah final, jika belum berharap gaji Pegawai Negeri mengalami kenaikan.	17	V	24
6.	Mohon informasi berapa investasi swasta pada tahun anggaran 1997/1998.	17	II	8
7.	Mohon ketegasan, instansi yang bertanggungjawab terhadap gali lubang tutup lubang dan bagaimana rencana sistem pembangunan satu saluran.	17-18	VI	29
8.	Mohon penjelasan jumlah daya tampung RSUD Dr. Soegiri untuk Klas I, II dan III dibanding pasien yang sakit dan harus rawat nginap.	18	XI	50
9.	Menghimbau agar proyek pemeliharaan berkala Dradah-Bluluk dijaga mutu dan kualitasnya.	18	VI	29
10.	Menghimbau agar Sub Terminal di Ngimbang difungsikan sebagaimana mestinya.	18	VI	32
11.	Menyarankan Eksekutif untuk membuat Tembok Penahan Tanah di Sukorame.	19	VI	30
12.	Terima kasih atas terlaksananya proyek pemeliharaan berkala Bluluk - Sukorame dan mengharapkan jembatan Kuwurejo mendapatkan prioritas dalam tahun ini.	19	VI	30
13.	Untuk kesekian kalinya menghimbau Eksekutif memprioritaskan membuat tugu batas wilayah di Lamongrejo Ngimbang.	19	IX	38

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HAL.	SEKTOR	HAL.
14.	Mengharapkan agar Pemerintah Daerah lebih meningkatkan bantuan kepada PD. BPR Bank Pasar.	19-20	VI	30
15.	Mendukung kebijaksanaan Eksekutif untuk mencukupi sarana kendaraan roda empat bagi Pemerintahan Desa.	20	XIV	56
16.	Menghimbau agar masalah ganti rugi tanah proyek Gresik-Widang segera diselesaikan dengan baik.	20	VI	30-31
17.	Mengharapkan agar proyek tembok penahan tanah di Desa Guyangan dianggarkan dalam PAK Tahun Anggaran 1997/1998.	20-21	VI	30
18.	Menghimbau agar Pemda Lamongan menyelesaikan masalah listrik di Desa Parengan, Graman dan Jegreg Kec. Modo.	21	VII	34
19.	Menyampaikan terima kasih dan mengharapkan dibangunnya Kantor Mapolsek dan Koramil di Kec. Sukorame.	21	XIV	56
20.	Mengucapkan selamat atas dibukanya tempat Rawat Nginap di Puskesmas Babat II.	21-22	XII	51
21.	Menghimbau diupayakan kiat-kiat khusus agar income tempat wisata Waduk Gondang bisa lebih meningkat.	22	VIII	36

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
	<b>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1.	<b>Sektor Industri</b>			
	-Bantuan industri/kerajinan 1997/1998	11	I	6-7
	-Kondisi industri kerajinan tahun sebelumnya	11	I	7
	-Penentuan bantuan kepada industri/kerajinan	11	I	7
	-Proyek penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Struktur Industri.	11	I	7
	-Limbah pembakaran Timah.	12	I	7
2.	<b>Sektor Pertanian dan Kehutanan.</b>			
	-Proyek penangkaran benih dan Proyek peningkatan produksi Pertanian	12	II	8-9
	-Proyek Demplot Cabe merah.	13	II	10
	-Proyek Pembudidayaan TAMYAMSANG.	13	II	11-13
3.	<b>Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.</b>	14	V	24-27
	<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>			
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14	V	24-27
	- Intensifikasi dan ekstensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.	15	V	24-27
	- Keberadaan asosiasi Sarang Burung terhadap pemungutan Pajak Sarng Burung.	16	V	24-27
	- Kendala dan hambatan terhadap penerimaan Retribusi.	16	V	24-27
	b. Bagian Laba BUMD.	16	V	27
	Terima kasih atas kenaikan laba BUMD			
	c. Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.	16,17	V	27
	Diharapkan penerimaan PBB pada PAK nanti bisa naik.			
	d. Pos Sumbangan dan Bantuan.	17	V	27
	Standart penyesuaian pemberian Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah atasan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.			
	<b>2. Belanja Rutin</b>			
	Penggunaan anggaran rutin secara proposional di sesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan rutin Pemerintah Kabupaten Tingkat II Lamongan.	17,18	V	28
	<b>3. Belanja Pembangunan</b>			
	-Alokasi anggaran proyek-proyekdilaksanakan sesuai ketentuan dan tetap diimbangi dengan mutu proyek.	18	XIX	63
	-Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran proyek.	18	XIX	63
	<b>Sub Sektor Perdagangan</b>			
	-Perencanaan pembangunan pasar yang akan datang lebih diprioritaskan ke pasar-pasar desa.	18	V	19
	-Perlu survey untuk membuka pasar desa di Desa Dermo Lemahbag Ibukota kecamatan Sarirejo.	19	V	20
	-Kerjasama bagi hasil pemilik tanah di sebelah selatan sub terminal lama Babat.	19	V	20
	<b>Sub Sektor Koperasi.</b>			
	-KUD yang terkena proyek pelatihan pengelolaan.	19	V	28-29
	-Kendala bagi KUD mandiri.	19	V	28-29

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
4.	<b>Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi</b>			
	1. Ploting dana 140 juta :	20	III	14-15
	- Proyeksi pemeliharaan Sarana dan Prasarana irigasi tersebut.	20	III	14-15
	- Biaya operasi dalam pelayanan irigasi	20	III	14-15
	2. Tentang sasaran proyek dana pembinaan dan pengembangan IPAIR sebesar Rp.14 juta.	20	III	15
	3. Peningkatan pengelolaan dan manajemen irigasi, status klasifikasi kelompok HIPPA dan HIPAM.	20	III	15-16
5.	<b>Sektor Tenaga Kerja.</b>			
	- Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja.	21	IV	18-19
	- Perlu diadakan Pembinaan Calon Tenaga Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan.	21	IV	18-19
	- Agar tetap diupayakan ada Kantor Depnaker di Kabupaten Lamongan.	21	IV	18-19
6.	<b>Sektor Transportasi.</b>			
	<b>Sub Sektor Prasarana Jalan</b>	21	VI	30-31
	1. Rencana Pembangunan jalan Gresik - Widang			
	a. Pelaksanaan roses pembebasan tanah masyarakat yang akan terkena proyek tersebut.	21	VI	30-31
	b. Upaya ganti rugi sisa bangunan yang terkena proyek untuk diperhitungkan.	21,22	VI	30-31
	c. Rencana ganti rugi yang sudah disetujui warga agar segera dibayarkan.	22	VI	30-31
	2. Mengupayakan jalan-jalan guna kelancaran arus transportasi dan membuka isolasi daerah pedesaan.	22	VI	31
	<b>Sub Sektor Transportasi.</b>			
	1. Keberadaan Sub Terminal Babat (lama).	22	VI	33
	2. Bermunculan kios-kios baru di pangkalan dokar. dan upaya penertibannya.	22,23	VI	33
7.	<b>Sektor Pertambangan dan Energi.</b>			
	- Pembangunan PJU di 7 Ibukota Kecamatan	23	VII	34-35
	- Pertimbangan dibangunnya PJU di jalur Surabaya-Babat.	23	VII	34-35
	- Tentang proyek penyediaan listrik pedesaan.	23	VII	35-36
8.	<b>Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah</b>			
	Tentang pengerjaan penanaman jaringan kabel telpon agar pelanggan tidak dirugikan.	24	VIII	37
9.	<b>Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.</b>			
	Upaya pembersihan saluran pembuangan air yang terdapat didalam kota.	24	IX	39
10.	<b>Sektor Pendidikan, Kepercayaan Terhadap TYMF, Pemuda dan Olahraga.</b>			
	<b>Sub Sektor Pendidikan.</b>			
	- Penyediaan dana Beasiswa bagi siswa berprestasi.	24	X	41-43
	- Anjuran kepada Guru Wanita beragama islam untuk mengenakan busana muslimah.	25	X	43-44
	- Peningkatan kualitas tenaga guru swasta.	25	X	44
	<b>Sub Sektor Pemuda dan Olahraga.</b>			
	Pemanfaatan Gedung Olahraga perlu dioptimalkan.	25	X	46

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
	<i>Sub Sektor Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</i> Keberadaan acara tutup Playang di Kecamatan Bron-dong.	25,26	XX	46
11.	<b>Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.</b> Tentang pelaksanaan pendataan penduduk di Kabu-paten Lamongan.	26	XI	49-50
12.	<b>Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran-an Wanita, Anak dan Remaja.</b> <i>Sub Sektor Kesehatan.</i> -Jasa pelayanan Askes. -Keramahan dan sopan santun tenaga medis terhadap pasien.	26 26,27	XII XII	51-52 52
	<i>Sub Sektor Kesejahteraan Sosial.</i> Penertiban oleh aparat pemerintah dalam menangu-langi WTS-WTS liar.	27	XII	52-53
13.	<b>Sektor Agama</b> -Bantuan lembaga-lembaga keagamaan perlu diting-katkan. -Dukungan dana yang memadahi untuk kegiatan I.PIQ.	27 27	XIII XIII	53 54
14.	<b>Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi</b> Keberadaan penyediaan dana pada sektor Ilmu Pe-ngetahuan dan Tehnologi.	28	XIV	55
15.	<b>Sektor Hukum.</b> -Bentuk dan sasaran proyek Pembinaan TUN dan Pe-nyuluhan Hukum. -Penambahan alokasi dana untuk penggandaan dan pendistribusian produk-produk hukum.	28 28	XV XV	55 55-56
16.	<b>Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.</b> <i>Sub Sektor Aparatur Pemerintah.</i> Sasaran proyek bantuan pembangunan kantor desa.  <i>Sub Sektor Pendayagunaan sistem dan pelaksa-naan Pengawasan.</i> -Sasaran dan bentuk proyek G D N -Tentang penggunaan uang desa secara tidak sah. -Usulan tentang pemakaian busana muslimah bagi Pegawai Negeri beragama Islam di lingk. Pemda.	29 29 30	XVI XVI XVI	57 58-59 59 43-44
17.	<b>Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.</b> -Besarnya alokasi dana RKPD dan besarnya penda-putan iklan. -Studi banding tentang pengelolaan RKPD Lamong-an denga RKPD daerah lainnya. -Penerbitan Buletin "Media Tantra"	30 30 30	XII XII XVII	60 60-61 61
18.	<b>Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.</b> -Sasaran dan bentuk kegiatan proyek Hansip. -Persiapan tenaga Hansip menjelang pelaksanaan Pemilu 1997.	30 31	XVII XVIII	61-62 62

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
	<b>FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN</b>			
1.	- Desa Jatipayak jadi desa kerajinan bambu. - Pemberian Pakaian Batik Khas Lamongan kepada PNS, yang tidak mematikan pengrajin batik yang lain.	15 dan 16 15 dan 16	I I	7-8 7-8
2.	- Peningkatan bibit unggul yang dikembangkan melalui Maros dan harga gabah kering	17	II	9-10
3.	- Hasil-hasil pelatihan pada petani kebun jambu mente di Paciran dan Brondong. - Peningkatan budidaya cabe jamu yang dialokasikan dari APBD.	17 Dan 18 18	II II	10 11
4.	Waduk Takeran Tikung yang rusak pintu airnya di usulkan mendapatkan penanganan.	18	III	17-18
5.	Penanganan jalan desa dengan menggiatkan dana swa daya masyarakat desa melalui :	19	VI	31
	1. Penanganan jalan ABRI masuk Desa diusahakan secara terpadu dan bantuan teknis serta mesin gilas.	19	VI	31
	2. a. Perlunya jalan tembus Turi - Kiringan - Debe b. Jalan Penghubung Ps. Kb.bahu - Ps. Kalipang. c. Jalan PUD dari Kedungpring - Dradah. d. Jalan Lamongan - Sugio yang hadan jalannya selalu longsor. e. Pemeliharaan jalan Soko - Karangbinangun sampai dengan Tambangan Bengawan Solo. f. Pembangunan Jalan Lingkar Sumargo - Deket.	20 20 Dan 21	VI VI	32 32
	3. Trayek baru Tanjung Kodok - Lmg - Mojokerto untuk meningkatkan wisata Kabupaten Lamongan.	21	VI	33
6.	Perluasan sarana telekomonikasi di desa-desa.	21	VIII	37-38
7.	1. Penanganan masalah banjir di dalam kota : a. Penuntasan normalisasi Kali Mengkuli, Kali Plalangan dan Kali Pengaron. b. Pendangkalan karena adanya bangunan Dam/ pintu air oleh masyarakat. c. Alur kali Pengaron ke Tambakboyo sampai Kali Deket.	22 22 22	IX IX IX	39 39 39
	2. Pembangunan Gapuro Batas Kota/Wilayah di Desa Jotosanur.	22 Dan 23	IX	39
8.	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Anggota Dewan.	23	IX	41
9.	Kebijaksanaan pemeratan tenaga pendidik.	23	X	45
10.	Tidak ada prioritas tenaga sukwan menjadi tenaga pendidik.	24	X	45
11.	Peningkatan bantuan alokasi dana pembangunan gedung Juang 45.	24	X	46

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
12.	Penyediaan prasarana olah raga menghadapi PON di Jawa Timur.	24	X	46-47
13.	Pembangunan Gedung Bulu Tangkis tertutup dan Lapangan Tenis semi tertutup.	24, 25	XII	47
14.	Rencana pembangunan Gedung PKK yang baru direncanakan sebagai Gedung Wanita.	17	XII	53
15.	Pelaksanaan proses pendaftaran calon Jamaah Haji tahun 1998.	26	XIII	54
16.	Pembangunan gedung wisma Persaudaraan Haji dan Pusat Ukhuwah Islamiyah.	26, 27	XIII	55
17.	Mengatasi kenakalan remaja di kota Lamongan.	27, 28	XVIII	62
18.	Rencana perluasan Pasar Ikan Dinoyo dan pembangunan Gedung SDN Dinoyo dan MIS Dinoyo tidak ditangi Pemerintah Daerah.	28, 29	V	20
19.	Sampai sejauh mana pengerjaan Proyek PDAM untuk mengatasi kesulitan air.	29	V	22-23
20.	Usulan Wilayah Maduran dan Sarirejo menjadi perwakilan Kecamatan.	29, 30	XVI	57
21.	Pengadaan Makam "TAMAN BAHAGIA" untuk pejuang Pembangunan dari kalangan ABRI maupun Sipil.	30, 31	XIX	63

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HAL.	SEKTOR	HAL.
	<b>FRAKSI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA</b>			
1.	Menyampaikan terima kasih sekaligus menghimbau Eksekutif agar mengupayakan kenaikan volume APBD lebih dari 10%.	13	V	28
2.	Mohon penjelasan sejauh mana hasil kajian pembangunan Pasar Benih Ikan di tengah sawah tambak.	13	V	21
3.	Menyarankan dibuat tangga ke lantai II Lamongan Plaza sedemikian rupa agar memudahkan pedagang	13	V	21
4.	Menghimbau Pihak Eksekutif melakukan pengawasan baik melekat maupun fungsional terhadap poryek Adipura dan mengerahkan potensi masyarakat untuk menunjang kebersihan lingkungan.	13-14	XIX	63
5.	Menghimbau, mohon Pihak Eksekutif mengupayakan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu/tpol light pertanda adanya jembatan.	14	VI	32
6.	Menyarankan penanganan kerusakan dinding penahan jalan di Desa Wedoro Kec. Sukorame diprioritaskan.	14	VI	30
7.	Mohon penjelasan : a. kemajuan fisik proyek yang didanai dari pinjaman Pemerintah Pusat. b. tindak lanjut presentasi oleh PT AQUATEK. c. bagaimana PT-PT lain yang ingin invest dan bekerja sama dengan PDAM d. ganti rugi pipa PDAM yang terkena proyek	14 dan 15	V	22-23
8.	Meningkatkan kapasitas sistem ventilasi pada obyek wisata Goa Maharani.	15	VIII	36-37
9.	Mendukung proyek pembangunan Gedung Bulu Tangksi Tertutup & Lapangan Tenis semi Tertutup.	15	X	47
10.	Mengajak semua pihak untuk mengendalikan diri agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.	15-16	XVIII	62-63
11.	Mengharapkan Eksekutif memantau warga Kabupaten Lamongan yang akan bekerja di Luar Negeri agar lewat Instansi yang terkait.	16	IV	18-19
12.	Mengharapkan Pihak Eksekutif memanfaatkan peluang yang ada & mencari terobosan baru untuk peningkatan PAD serta PD Aneka Lamongan Jaya dirintis mulai sekarang.	16	V	23



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

---

**JAWABAN EKSEKUTIF  
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA  
RAPAT PARIPURNA IV TAHUN SIDANG 1996/1997  
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

---

*Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang saya hormati,

Saudara Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hadirin dan para Undangan yang saya hormati,

Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga atas segala nikmat tersebut kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti Sidang Paripurna dalam acara penyampaian Jawaban Eksekutif dengan keadaan sehat dan sejahtera.

Pihak Eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-fraksi Dewan yang telah menyampaikan pandangan, pemikiran dan ungkapan permasalahan yang disertai himbauan dan saran yang sangat berharga, sehubungan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Sdr. Kardo Surjopambudi, sebagai juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
2. Yang Terhormat Sdr. Mashuri, sebagai juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan.
3. Yang Terhormat Sdr. H.M. Sudigno, sebagai juru bicara Fraksi Karya Pembangunan.
4. Yang Terhormat Sdr. I Wayan Masta, sebagai juru bicara Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Yang Terhormat Panitia Anggaran Dewan yang dengan penuh arif telah menyampaikan pandangan, pemikiran, saran dan himbauan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 yang pada akhirnya berkesimpulan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 serta dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998.

Dari keseluruhan pendapat, pandangan, pemikiran serta saran dan himbauan yang diungkapkan dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat terlihat nyata betapa besar perhatian Dewan terhadap masalah yang kita hadapi bersama. Secara nyata nampak pula alur-alur kehendak yang sangat kuat untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan, yang kesemuanya itu mempermudah usaha kita untuk mencapai suatu titik pertemuan pendapat yang berke-mufakatan.

Dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 ini dapat dirasakan adanya semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong-royongan sebagai pancaran dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Untuk itu saya yakin bahwa kita semua masih konsisten untuk memegang dan menerapkan nilai moral Pancasila yang kita yakini sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga menuntun kita dalam memadu pendapat dengan bertitik tolak pada Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Telah menjadi tekad kita semua bahwa sejak awal Orde Baru menjelang PJP I kita telah sepakat meletakkan dasar bagi kemurnian pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata, konsekwen dan dinamis.

Atas dasar kesadaran dan tekad itu pula, maka dalam kurun waktu PJP I kita telah memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam produk Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985.

*Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Sejak awal kemerdekaan hingga masa sekarang ini, kita telah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat, sehingga membuat kita lebih dewasa dalam berkehidupan Demokrasi Pancasila, lebih matang dalam mengenali masalah, dan lebih arif bijaksana dalam menangani permasalahan bangsa pada umumnya, dan bidang sosial politik pada khususnya.

Bila diamati secara mendalam, kehidupan sosial politik di tanah air, khususnya setelah masa Orde Baru, dapat kita rasakan banyak kemajuan yang menggembirakan. Pengalaman pahit sebelum masa Orde Baru memberikan pelajaran kepada Bangsa Indonesia bahwa betapa sangat berbahayanya apabila diantara kita ada yang mencoba meninggalkan apalagi mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adanya pihak yang menghendaki perpecahan bangsa memberi kesadaran bahwa bersatu lebih baik daripada bercerai berai dan berbaku hantam. Melalui persatuan dan kesatuan bangsa, lebih banyak hal yang dapat diselesaikan bersama, sehingga mendatangkan manfaat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Pengalaman demokrasi liberal dan konsepsi negara agama baik yang dilaksanakan melalui pemberontakan maupun pengalaman pada akhir masa konstituante; pemberontakan komunis baik pemberontakan PKI Muso 18 September 1948 maupun pemberontakan Gerakan 30 September 1965 dan beberapa kegiatan ekstrim lainnya menunjukkan betapa seringnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam situasi dan kondisi kritis.

Dapatlah dirasakan betapa sulit masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia pada saat itu. Karena adanya kekurangan sadaran makna persatuan kesatuan bangsa menyebabkan timbulnya keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berakibat penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh tidak dapat berjalan sebagaimana saat ini.

*Hadirin dan Sidang Dewan yang terhormat,*

Sebagaimana kita akui bersama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kehidupan bangsa. Berbagai bentuk kesempatan dan pemerataan telah berhasil diwujudkan, baik oleh dan melalui kebijaksanaan pemerintah ataupun oleh dan melalui partisipasi serta swadaya masyarakat. Besarnya tabungan masyarakat (*public saving*) adalah salah satu contoh konkrit adanya partisipasi masyarakat untuk membiayai pembangunan bangsa. Namun demikian kita tidak menutup mata, bahwa masih ada yang tidak puas dengan apa yang telah kita capai bersama. Hal itu adalah wajar dan dapat dipahami, sekaligus diwaspadai.

Melebarnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin adalah satu *issue* yang oleh sementara pihak akan selalu dihidup-hidupkan untuk dijadikan dalih kegagalan pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. Satu hal yang perlu diingat disini apabila kesenjangan kaya miskin didekati melalui kriteria sosial ekonomi dengan menggunakan *koeffisien gini* sebagai tolok ukurnya secara jujur dan ilmiah, maka sejak Pelita I sampai dengan sekarang kita akan dapat menunjukkan suatu keadaan sosial ekonomi yang semakin hari semakin baik.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang diikuti meningkatnya rasionalitas masyarakat akan memunculkan serangkaian tuntutan baru di dalam era pembangunan berikutnya. Karena itu permasalahan sosial ekonomi di masa mendatang itu kiranya akan mewujud di dalam kategori sebagai berikut :

*Pertama*, bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar dapat berada diatas atau sekurang-kurangnya seimbang dengan pertumbuhan penduduk dalam arti peningkatan kesejahteraan yang lebih merata dan mencukupi tingkat hidup dan kehidupan pada zamannya;

*Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat,*

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan himbauan serta pertanyaan yang Terhormat Fraksi-Fraksi Dewan yang saya rangkum dalam sektor per sektor, sebagai berikut :

**I. SEKTOR INDUSTRI**

**SUB SEKTOR INDUSTRI**

Kebijaksanaan pembangunan Sektor Industri diarahkan pada pengembangan usaha industri kecil dan kerajinan rakyat dengan sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas hasil produksinya.

Pada kesempatan yang baik ini perlu disampaikan penjelasan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan Sektor Industri sebagai berikut :

1. Sentra Industri Kecil yang mendapat bantuan peralatan dan pelatihan - an tahun 1997/1998 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) yaitu :
  - Industri Kerajinan Genteng Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng.
  - Industri Kerajinan Konveksi Desa Kebonagung Kecamatan Babat.
  - Industri Kerajinan Gerabah Desa Gampangsejati Kecamatan Laren.
  - Industri Kerajinan Bordir Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun.
  - Industri Kerajinan Bordir Desa Pringgoboyo Kecamatan Sekaran.
2. Dari sisi pengorganisasian terhadap Sentra Industri Kerajinan yang telah mendapat bantuan peralatan dan pelatihan telah berjalan sesuai arah dan kebijaksanaan tehnis, sedangkan dari sisi hasil produksi dan pemasaran sehingga menambah penghasilan, masih terus diupayakan Pihak Eksekutif secara optimal.

Langkah Eksekutif dalam meningkatkan kualitas hasil produksi batik tersebut melalui:

- Pelatihan Pewarnaan, Pengembangan desain, Penerapan Gugus Kendali Mutu, Study banding ke Yogyakarta.

Sedangkan untuk memperkuat pasar, Eksekutif memberi binaan antara lain :

- Penganekaragaman motif produksi, Penganekaragaman jenis produksi, Peningkatan mutu produksi, Peningkatan promosi dan pameran.

## II. SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

### SUB SEKTOR PERTANIAN RAKYAT

1. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang Investasi swasta yang mengarah pada pengelolaan produk pertanian pada tahun 1997/1998, dapat dijelaskan bahwa yang bergerak di bidang pengelolaan produk-produk pertanian yang ada di Kabupaten Lamongan sementara ini hanya pada skala kecil/ taraf home industri kecil antara lain : pembuatan keripik pisang, pembuatan tahu dan pembuatan tempe.
2. Terhadap pendapat Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang proyek Penangkaran Benih Padi dapat dijelaskan bahwa memang proyek penangkaran benih padi bersifat lanjutan. Adapun informasi yang berkaitan dengan proyek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Luas areal yang akan diproyeksikan sebagai lahan penangkaran benih padi di wilayah yang direncanakan yaitu seluas 25 Ha, dan benih yang akan dihasilkan diperkirakan (kurang lebih) sebanyak 44.285,5 Kg.
  - b. Dari hasil produksi tersebut apabila diuangkan (dijual) akan menghasilkan uang sebesar 30 Juta 999 Ribu 850 Rupiah dengan harga 700 Rupiah per Kilo Gram setelah dikurangi biaya produksi.
  - c. Dalam rangka untuk memperoleh produksi benih padi yang layak mendapatkan sertifikat, sudah barang tentu sejak awal dari persiapan, penebaran benih hingga pemeliharaan dilakukan secara selektif dan benar-benar memperoleh perhatian antara lain pembinaan dari Dinas yang bersangkutan.

- d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani dan kelompoknya agar dapat memperoleh bantuan Hand Tractor atau pompa air antara lain :
- Kelompok Tani yang mempunyai Daerah yang dalam pengolahan lahan pertaniannya sudah mengalami kekurangan Tenaga Kerja Hewan.
  - Biaya tenaga kerja buruh tani relatif tinggi (makin meningkat).
  - Bagi Daerah-daerah yang lahan pertaniannya lebih tinggi dari permukaan sungai yang mengairinya perlu ditunjang dengan pompa air terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan pompa air tersebut dapat difungsikan sebagai alat untuk mengurangi genangan air.
  - Kelompok Tani tersebut dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun harus sudah bisa mengadakan revolving dengan mewujudkan lagi satu unit alat-alat pertanian sesuai dengan yang diterima. Dana tersebut diambilkan dari jasa yang diperoleh selama alat-alat pertanian tersebut dioperasikan.
- e. Apabila Hand Tractor atau pompa air tersebut hilang atau dijual, maka sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kelompok tani yang bersangkutan untuk menggantinya.

3. Selanjutnya permintaan penjelasan terhadap benih padi Varitas unggul Mamberamo dari Fraksi Karya Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tentang keberadaan benih padi Varitas unggul Mamberamo untuk saat ini yang ada di Kabupaten Lamongan memang belum bisa membuahakan hasil yang diharapkan para petani. Sebagaimana hasil survey dan pengamatan di lapangan oleh Petugas PPL diperoleh hasil temuan bahwa benih padi Mamberamo tidak semua jenis tanah cocok untuk varitas tersebut. Hal ini ditengarai adanya tanah/sawah yang bersifat lembek (sawah tambak) yang terdapat di wilayah bagian Utara, sebagai akibatnya padi mudah rebah sehingga berpengaruh pada turunnya produksi, namun pada musim kemarau panjang masih dibutuhkan dan diharapkan hasilnya. Bagi daerah lahan sawah biasa (sawah bukan tambak) yang ada di wilayah bagian Selatan masih dimungkinkan dapat berhasil, sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya pada musim tanam tahun 1996/1997 Varitas baru yang dimunculkan adalah Padi Varitas Maros, karena padi varitas Maros akan memberikan suatu harapan :

- a. Hasil produksinya lebih tinggi bila dibanding dengan varitas lain (Memberamo dan IR 64).
- b. Varitas Maros lebih tahan terhadap Hama Wereng Coklat (*Tungro*), disamping itu varitas tersebut memberikan rasa lebih enak bila dibanding dengan jenis varitas lain.

Selanjutnya perlu diinformasikan pula bahwa pada musim tanam tahun 1996/1997 pengembangan padi varita Maros tersebut dilaksanakan dalam Demonstrasi SUTPA (Sistem Usaha Tani Berbasis Padi) seluas 40 Ha, dimana untuk musim tanam 1997/1998 nanti akan dikembangkan lebih luas lagi, adapun lokasi demplotnya berada di Kecamatan Kedungpring.

4. Mengenai harga jual Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani mencapai Rp.370 s/d Rp.380 / Kg. Sedangkan harga pembelian KUD sesuai Ketentuan Inpres Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 24 Januari 1997 Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp.385 / Kg, Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp.525 / Kg.

Namun demikian, walaupun harga Gabah Kering Panen sedikit dibawah harga dasar, akan tetapi produksi terhadap penggunaan sarana produksi masih menggunakan harga lama, sehingga terhadap nilai jual harga gabah kering panen di tingkat petani masih cukup menguntungkan.

## **SUB SEKTOR PERKEBUNAN**

1. Terhadap informasi tentang pembuatan Denplot cabe merah yang diminta oleh Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pembuatan Denplot cabe merah sebanyak 2 unit yang rencananya akan diproyeksikan di Kecamatan Laren, kegiatannya baru akan dimulai sekitar Bulan September 1997. Kegiatan ini sebenarnya merupakan tanaman diluar musim (*Off Season*) sebagai langkah terobosan untuk mengantisipasi melonjaknya harga cabe merah pada saat persediaan di Tingkat Petani sudah habis. Biasanya harga cabe merah pada saat panen Denplot tersebut lebih tinggi dari pada harga biasanya.

2. Selanjutnya terhadap permohonan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang penjelasan budidaya jambu mente dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam usaha untuk meningkatkan nilai tambah dari jambu mente di Kecamatan Paciran dan Brondong, Petani selain telah dibantu peralatan pembuatan sirup sebanyak dua unit, juga dibantu alat pengupas biji mente (kacip). Agar alat yang telah dibantukan dapat dioperasionalkan, petani telah dilatih dalam praktek pembuatan sirup, abon mente dan pengacipan mente biji.

Hasil sementara yang dapat kami informasikan dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Pada waktu pengedropan peralatan, produksi buah jambu mente sudah habis, jadi pelaksanaan pembuatan sirup dan abon mente baru akan dilaksanakan pada musim panen pada tahun 1997 ini.
- b. Pengacipan/pengupasan biji mente untuk produksi kacang mente masih memerlukan ketrampilan yang memadai, serta belum adanya pengusaha di Daerah yang mau dan mampu sebagai pengumpul biji mente untuk diproduksi kacang mente.

Sedangkan peningkatan pendapatan petani cabe jamu mulai dapat dirasakan oleh petani, penjualannya dapat dilaksanakan terkoordinir secara kelompok.

Harga cabe jamu kering relatif baik, pada tahun 1996 harga rata-rata 6 Ribu Rupiah, pada panen 1997 di bulan Januari sampai Pebruari 7 Ribu Rupiah, pada awal bulan Maret 1997 awal mencapai 7 Ribu 5 Ratus Rupiah per kilogram kering. Dengan semakin membaiknya harga, perkembangan secara swadaya areal cabe jamu cukup menggembirakan, walaupun petani masih mengharapkan bantuan pengadaan tanaman kajaran untuk pohon panjatan.

## **SUB SEKTOR PETERNAKAN**

Atas permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan berkenaan dengan proyek pembudidayaan Tamyamsang yang dialokasikan di Kecamatan Kalitengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Luas areal lahan tambak yang akan diproyeksikan seluas 20 Ha, 6 Unit kandang sebanyak 1.200 ekor ayam dan 4.000 batang pohon pisang.

2. Untuk pengadaan ayam direncanakan akan diserahkan kepada petani untuk mencari di Daerah sekitar lokasi proyek yang dikandung maksud agar muda beradaptasi. Sedangkan Dinas Terkait bertugas untuk membimbing, membina dan membantu dalam teknisnya saja. Untuk itu seluruh komponen paket akan diterimakan kepada petani, konsekwensinya apabila dalam pengadaan ayam setelah diterima oleh petani kemudian terjadi kematian maka sudah barang tentu menjadi tanggungan petani tersebut mengingat proyek Tamyamsang nantinya bersifat kredit.
  
3. Dalam pemberian paket kredit kepada petani sudah barang tentu diperhitungkan kewajiban pengembalian kreditnya, yaitu kredit lunas dalam jangka 3 tahun.  
Tahun Pertama petani mengangsur sepertiga nilai paket dengan bunga 6% per tahun. Begitu seterusnya pada tahun ke dua dan lunas pada tahun ke tiga, dan pengangsuran dimulai apabila proyek sudah berproduksi.
  
4. Perkembangan produksi sejak dimulainya pelaksanaan proyek Tamyamsang dari masing-masing komoditi antara lain :
  - a. Produksi ikan bandeng, tawes dan tombro sebanyak 127,38 kwintal.
  - b. Produksi ayam (telur) mulai berproduksi bulan September 1996 sampai dengan bulan Pebruari 1997 sebanyak 71.880 butir.
  - c. Produksi pisang cavendish, dari jumlah pisang yang sudah ditanam sebanyak 13.945 batang dan diperkirakan panen sampai dengan bulan Mei 1997 sebanyak 9.989 pohon.  
Dengan perbandingan hasil produksi sebelum mengikuti program Tamyamsang dan sesudah mengikuti program Tamyamsang yakni :
    - a. Sebelum mengikuti program Tamyamsang :
      - Sub Sektor Perikanan dari hasil bersih tiap tahun dalam 3 kali panen (bandeng, tombro dan tawes) diperoleh hasil bersih 2 Juta 640 Ribu Rupiah.

- Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Pertanian belum ada program Tamyamsang.
- b. Sesudah Program Tamyamsang :
- Sub Sektor Perikanan dengan hasil bersih tiap tahun terhadap budi daya bandeng, tombro dan tawes dengan 3 kali panen diperoleh hasil bersih 3 Juta 358 Ribu 200 Rupiah kemudian budi daya bandeng dan udang galah untuk 2 kali panen diperoleh hasil 4 Juta 38 Ribu 750 Rupiah.
  - Sub Sektor Peternakan dengan hasil bersih tiap tahun diperoleh pendapatan sebesar 1 Juta 554 Ribu Rupiah.
  - Sub Sektor Pertanian dengan hasil bersih yang diperoleh tiap tahun dengan 2 kali panen sebesar 1 Juta 275 Ribu Rupiah.
5. Peranan Koperasi Tamyamsang terhadap pelayanan kepada anggotanya antara lain :
- a. Permodalan :  
 Dalam usaha pengembangan kegiatan Koperasi Tamyamsang guna menunjang dan mencukupi kebutuhan anggota (petani), Koperasi Tamyamsang disamping menghimpun modal sendiri yang berasal dari anggota juga mendapat suntikan usaha dari Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Disamping itu juga mendapatkan bantuan lunak dari pihak ketiga (Perum Perhutani dan Pos dan Giro Jawa Timur).
  - b. Penyediaan kebutuhan petani berupa pakan dan obat-obatan ternak ayam buras, pupuk dan kebutuhan lainnya melalui usaha Waserda Saprodi.
  - c. Pemasaran Produksi yang dihasilkan oleh anggota Koperasi yaitu Koperasi Tamyamsang telah menjalin hubungan kemitraan melalui beberapa pedagang lokal, disamping dengan pengusaha berskala besar yang terkait dengan komoditi tambak, ayam dan pisang serta asosiasi-asosiasi dalam rangka untuk mencari peluang pasar manakala pasar lokal dan sekitarnya telah jenuh.

### III. SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI

#### SUB SEKTOR IRIGASI

Pembangunan Sub Sektor ini diarahkan pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang sasarannya adalah untuk peningkatan kemampuan pengelolaan dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Mengenai permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai Sub Sektor ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. a. Mengenai peningkatan pelayanan irigasi pada Tahun Anggaran 1997/1998 diploting sebesar 140 Juta Rupiah dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana irigasi (IPAIR) yang pembangunannya diproyeksikan pada 18 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedungpring, Deket, Sekaran, Tikung, Kembangbahu, Sukodadi, Sugio, Lamongan, Modo, Kalitengah, Pucuk, Glagah, Laren, Karanggeneng, Karangbinangun, Turi, Babat dan Kecamatan Solokuro.
- b. Sedangkan biaya operasional dalam pembangunan sarana dan prasarana irigasi adalah :
  - Biaya Administrasi dan upah pungut sebesar 20 %
  - Biaya Pembangunan sarana dan prasarana sebesar 80%
2. Ploting dana sebesar 14 Juta Rupiah untuk pembinaan dan pengembangan IPAIR digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Monitoring pelaksanaan IPAIR dilokasi IPAIR (18 Kecamatan), penyuluhan dan sosialisasi IPAIR pada masyarakat petani pemakai air yang diharapkan program IPAIR dapat terus diintensifkan.

- b. Pengadaan blanko-blanko/formulir penagihan IPAIR.
- c. Pengadaan blanko Daftar Areal Tanam/Daftar Areal Panen.
- d. Set-up data (Profil HIPPA dan Gabungan HIPPA, penelusuran jaringan dan pembuatan peta sosiohidro).

3. a. Dari sejumlah 463 Desa dan 12 Kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan, yang telah dibentuk kelompok HIPPANYA dengan Keputusan Desa dan Pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan adalah sebanyak 309 kelompok HIPPA dengan klasifikasi :

- Sudah berkembang : 96 Kelompok
- Sedang berkembang : 170 Kelompok
- Belum berkembang : 43 Kelompok
- Belum terbentuk : 154 Kelompok

Adapun belum terbentuknya HIPPA dimaksud disebabkan karena :

- Daerah perbukitan/pegunungan
- Daerah tadah hujan

Sedangkan kelompok HIPPAM yang baru dibentuk dengan Keputusan Desa dan Pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan adalah sebanyak 5 kelompok antara lain :

1. Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring.
2. Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup
3. Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran
4. Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup
5. Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang.

b. Adapun kriteria penilaian kelompok HIPPA meliputi :

1. Bidang Organisasi
2. Bidang Administrasi
3. Bidang Keuangan
4. Bidang Teknik keirigasian
5. Bidang Teknik Pertanian
6. Bidang Koordinasi.

c. Sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 kelompok HIPPA dan HIPPAM yang telah mengikuti lomba adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Nama HIPPA	Desa/Kec	Pemenang
1.	1990/1991	Sejahtera	Mertani Kr.Geneng	Juara III Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro
2.	1991/1992	Sbr.makmur	Blawirejo Kd.Pring	Juara I Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro (Maju Tk.I)
3.	1992/1993	Tanimakmur	Menongō Sukodadi	Juara III Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro
4.	1993/1994	Tirtomulyo	German Sugio	Juara II Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro
5.	1994/1995	Lancarjaya	Surabaya Sukodadi	Juara III Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro
6.	1995/1996	Tirtoarum	Sd.mlangean Kd.Pring	Juara II Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro
7.	1996/1997	Tirtomulyo	Kuluran Kalitengah	Juara II Tk. Pb. Gubernur Wil.II B.goro

Untuk kelompok HIPPAM pernah maju ke Tingkat I sebagai Juara Harapan III Tahun 1996/1997 yaitu HIPPAM Sendang - gede Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup, sedangkan HIPPAM Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring, Sendangduwur Kecamatan Paciran, Sumberbendo Kecamatan Mantup dan Sendangrejo Kecamatan Ngimbang hanya sebagai pemenang di Tingkat Pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro.

4. Disampaikan terima kasih atas permohonan penjelasan/usulan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap fungsi Waduk yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian sekaligus peningkatan produksi pertanian dimana masih memerlukan optimalisasi, baik pengerukan di dalam Waduk itu sendiri maupun peninggian tangkisnya, begitu pula terhadap penjagaan Waduk itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut kiranya dapat disampaikan bahwa selama ini didalam mengelola/mengeksploitasikan sarana dan prasarana pengairan yang meliputi 53 jaringan irigasi yang terdiri dari Waduk pengairan 33 buah, Rawa 11 buah dan Pompa air 3 buah serta 6 buah bangunan lainnya (termasuk areal pasang surut seluas 44 ribu 575 Ha), hanya tersedia 212 orang, termasuk tenaga administrasi. Seharusnya idealnya guna keperluan penanganan hal tersebut sekurang-kurangnya harus ada tenaga sejumlah  $\pm$  350 orang.

- Terhadap Waduk Takeran Kecamatan Tikung yang beberapa waktu lalu rusak pintu airnya, kini telah dilakukan perbaikan secara pemenuhan fungsi saja, untuk kemudian diprogramkan akan diadakan perbaikan lebih lanjut pada Tahun Anggaran 1997/1998. Sedangkan pengisian Waduk selama ini dilakukan hanya sebagian, hal ini dimaksudkan guna pengamanan terhadap kondisi Waduk itu sendiri, akan tetapi untuk memberikan isi Waduk secara normal akan dilaksanakan akhir Maret 1997 ini.
- Disampaikan penjelasan pula bahwa masalah Waduk Takeran di Kecamatan Tikung yang beberapa waktu lalu rusak pintu airnya telah dilakukan perbaikan secara pemenuhan fungsi saja, penanganannya belum tuntas sehingga akan diadakan perbaikan lebih lanjut pada Tahun Anggaran 1997/1998.

Sedangkan untuk pengisian Waduk tidak bisa penuh atau hanya sebagian, hal ini dimaksudkan guna pengamanan terhadap kondisi bangunan Waduk itu sendiri dan melihat musim hujan yang masih berjalan. Selanjutnya untuk memberikan isi Waduk secara penuh/normal direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini.

#### **IV. SEKTOR TENAGA KERJA**

##### **SUB SEKTOR TENAGA KERJA**

1. Saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar penanganan masalah ketenagakerjaan dapatnya ditangani lebih intensif melalui penyelenggaraan Balai Latihan Kerja (BLK), disampaikan penjelasan bahwa pelatihan kerja yang ada ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja bersama Dinas Instansi Terkait dipusatkan di Balai Latihan Kerja Bojonegoro melalui Kursus Latihan Kerja (KLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, disamping itu Kursus Latihan Kerja Depnaker yang berada di Bojonegoro juga merekrut siswa dari Kabupaten Lamongan dan diprogramkan pelatihan kerjanya di Lamongan.
2. Terhadap saran Fraksi Persatuan Pembangunan agar perwakilan Departemen Tenaga Kerja Bojonegoro di Lamongan dapat mengadakan pembinaan terhadap calon tenaga kerja dan latihan kerja dapat dijelaskan, bahwa kedudukan Kantor Departemen Tenaga Kerja yang ada di Lamongan bersifat perwakilan namun demikian telah memprogramkan pembinaan calon tenaga kerja ke Kecamatan-kecamatan yang dirasa perlu, selain itu juga telah memprogramkan pelatihan kerja, khusus untuk calon tenaga kerja dari Kabupaten Lamongan.

3. Mengenai pendirian Kantor Departemen Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan, Perlu kami informasikan bahwa Kantor penghubung Depnaker Bojonegoro di Lamongan telah ditempatkan seorang pejabat eselon IV sebagai koordinator penghubung. Sehingga masalah-masalah ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan tenaga kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian Pihak Eksekutif tidak henti-hentinya berupaya dengan berbagai cara, baik usulan lewat Rakorbang maupun terobosan-terobosan lain, sampai sekarang masih juga belum berhasil.
4. Harapan Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar Eksekutif memantau sejak dini terhadap tenaga kerja Kabupaten Lamongan yang akan bekerja di Luar Negeri agar melalui prosedur yang benar, hal tersebut telah ditempuh oleh Pihak Eksekutif, melalui penyuluhan mengenai prosedur yang benar, dari prosedur tahap awal sampai dengan tahap akhir untuk menjadi seorang TKI serta syarat-syarat yang diperlukan secara benar.

## **V. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI**

### **SUB SEKTOR PERDAGANGAN**

1. Mengenai saran, dan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan, agar perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang lebih diprioritaskan sasaran obyeknya ke Pasar-pasar Desa disampaikan terima kasih.  
Namun demikian sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya memantapkan penyelenggaraan otonomi Desa sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka perencanaan pembangunan Desa diarahkan pada upaya terwujudnya kemandirian Desa sendiri khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa seperti Pasar Desa, yang secara formal selama ini berada di bawah penguasaannya.

Dalam pelaksanaannya sudah barang tentu Pihak Eksekutif akan senantiasa memberikan pembinaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pihak Eksekutif menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi dan saran bahwa perlu dibukanya Pasar Desa yang terletak di Desa Dermolemahbang, namun demikian perlu dipahami bahwa untuk membuka sebuah pasar kiranya tidak sekedar mendirikan los dan bangunan pasar, tetapi menumbuhkan lembaga ekonomi masyarakat yang memerlukan dukungan dan kesiapan peran serta masyarakat. Oleh karena itu keseluruhan interaksi berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya dan teknis serta peluang pengembangannya sebuah pasar masih harus dikaji secara sistematis dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
3. Mengenai kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Sdr. Zainal Mas'ud memang pernah ada dan berlanjut sampai dengan saat ini.  
Sedangkan mengenai informasi adanya pengusuran terhadap kios-kios yang berada di sebelah Selatan Sub Terminal Lama Babat bukanlah merupakan kehendak dan tindakan yang dikehendaki Pemerintah Daerah, akan tetapi dimungkinkan sebagai akibat pelaksanaan eksekusi penetapan hukum yang menjadi hak Sdr. Zaenal Mas'ud.
4. Terhadap informasi Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan mengenai rencana rehabilitasi Pasar Ikan Dinoyo yang dalam Tahun Anggaran 1997/1998 ini dananya dialokasikan sebesar 35 Juta Rupiah, pelaksanaannya tidak akan memindahkan Gedung SD Negeri Dinoyo dan MI Swasta Dinoyo.
5. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkaitan dengan perencanaan pembangunan

Pasar Benih Ikan di Lamongan yang masih dalam pengkajian teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pembangunan Pasar Benih Ikan secara teknis penanganannya sangat spesifik yaitu memerlukan fasilitas yang layak, seperti halnya jaminan kualitas dan kuantitas sumber air sepanjang tahun dalam keadaan mengalir.

Berdasarkan hasil kajian teknis ditemukan suatu permasalahan yaitu belum adanya lokasi yang representatif dan memenuhi persyaratan baik dari sisi teknis maupun ekonomis, atau sumberdaya alam ditinjau dari segi topografisnya kurang mendukung.

6. Tangga naik ke Lantai II Lamongan Plaza menjadi satu jalan, baik pengunjung/pembeli dan pedagang yang akan menempati kios/los Lantai II, hal ini sesuai dengan perencanaan yang ada karena kategori pasar yang kita bangun adalah pasar Klas Tiga sehingga tidak perlu tangga tersendiri untuk menaikkan barang dari Lantai I ke Lantai II dan luas kios/los setiap pedagang relatif kecil yaitu 3,5 x 4 meter sehingga tangga yang ada tidak menyulitkan bagi pengunjung/pembeli/pedagang.

## **SUB SEKTOR PENGEMBANGAN USAHA DAERAH**

1. Harapan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk lebih meningkatkan lagi bantuan permodalan kepada PD. BPR Bank Pasar guna meningkatkan operasionalnya menjadi perhatian Eksekutif.

Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa modal yang disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 1996/1997 secara akumulatif tercatat sejumlah 456 Juta 587 Ribu 894 Rupiah, dimana setiap tahun kita selalu berupaya untuk memperkuat permodalannya sehingga diharapkan dapat lebih mandiri dan juga sekaligus dapat meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah dari sisi bagianya. Untuk keperluan tersebut dalam tahun 1997/1998 direncana-

kan penambahan modalnya sebesar 75 Juta Rupiah.

2. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tentang PDAM dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Proyek pengembangan sistem penyediaan air bersih PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibiayai dengan dana pinjaman sebesar 7,5 Milyar Rupiah yang pelaksanaannya melalui tiga tahap antara lain :

1) Tahap Pertama : TA. 1996/1997 Rp. 3.178.705.000,00

2) Tahap Kedua : TA. 1997/1998 Rp. 3.161.868.000,00

3) Tahap Ketiga : TA. 1998/1999 Rp. 1.159.427.000,00

Adapun pelaksanaan pekerjaan proyek tahap pertama saat ini telah mencapai 90%, sedangkan pembayaran dari Pemerintah Pusat baru 60%. Investasi dari dana ini secara keseluruhan diarahkan untuk pengembangan :

- Jaringan pipa transmisi diameter 400mm sepanjang 10.000m.
- Jaringan pipa distribusi tersier sepanjang 70.000m.
- Peningkatan sambungan pelayanan sebanyak 5.600 unit untuk pengembangan wilayah di lokasi Babat, Gembong, Moropelang, Tritunggal, Pucuk dan sebagian Kota Lamongan.

b. Keinginan dari pihak investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan air bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai paparan PT AQUATEX MAXCON INDONESIA pada tanggal 28 Pebruari 1997, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990, proposal tersebut masih dalam pembahasan Panitia Penyiapan Perjanjian Kerjasama yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor: 188/110/SK/410. 013/1997 tanggal 10 Maret 1997.

Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibuatkan kesepakatan bersama antara PDAM dengan PT AQUATEX MAXCON INDONESIA untuk menyusun studi kelayakan yang lebih mendetail atas pembangunan dimaksud.

- c. Beberapa perusahaan yang berminat ikut membangun di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan adalah PT SAFIRA BENGAWAN TIRTA yang tertarik untuk mengembangkan air bersih di kawasan Pantai Utara, namun sampai saat ini masih dalam proses pendataan dan penyusunan proposal.
- d. Dengan adanya pembangunan proyek pelebaran jalan raya Gresik - Widang, maka perlu ada pemindahan pipa PDAM yang disesuaikan dengan konstruksi yang ada.

Pemindahan ini akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan telah dibahas antara PDAM dengan pihak proyek, sedangkan proses ganti rugi masih dalam pembahasan.

3. Terhadap upaya pengembangan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana harapan Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pihak Eksekutif berusaha menggali dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada serta mencari terobosan baru agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah kita dapat semakin meningkat pada masa yang akan datang. Sudah barang tentu upaya-upaya tersebut akan bertumpu pada kondisi potensi daerah yang ada dan kemampuan sumber daya serta sumber dana yang tersedia.

Berkenaan dengan itu maka salah satu langkah yang telah diambil oleh Pihak Eksekutif ialah mengusahakan terbentuknya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya yang sudah diawali dengan menyusun Peraturan Daerah sebagai landasan pijaknya dan telah diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk memperoleh pengesahannya.

Selanjutnya seperti harapan Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka Pihak Eksekutif akan segera mengambil langkah untuk memenuhi kegiatan usaha sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

## **SUB SEKTOR KEUANGAN DAERAH**

1. Permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu :
  - a. pemungutan retribusi ijin dispensasi jalan/jembatan bekerja sama dengan PT Anggun Bhakti Perkasa Sidoharjo.
  - b. pemungutan retribusi parkir pada lahan parkir umum Pasar Sidoharjo Lamongan bekerja sama dengan Sdr. Drs. Munaji Lamongan.
  - c. pengelolaan kamar mandi dan WC umum bekerja sama dengan CV Rima Galuh Siliwangi Magetan.
  
2. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang kenaikan pada Pos Belanja Pegawai dapat dijelaskan bahwa besarnya plafond anggaran untuk Belanja Pegawai adalah sesuai dengan alokasi Subsidi Belanja Pegawai/Perimbangan Keuangan Tahun 1997/1998 yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997.  
Selanjutnya mengenai besarnya plafond anggaran untuk Belanja Pegawai ini telah diperhitungkan dengan rencana penyesuaian gaji pokok baru mulai 1 April 1997 sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen Keuangan tanggal 5 Maret 1997 No. : SE-28/A/31/0397.
  
3. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pemba - ngunan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah disampaikan sebagai berikut :
  - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 1) Terhadap himbauan dan saran Fraksi Persatuan Pembangunan agar Eksekutif tetap selalu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi Daerah, kiranya sudah merupakan tekad dan langkah Eksekutif untuk membina penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Namun demikian perlu dipahami bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut akan tetap dibatasi oleh pengembangan potensi yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila pada PAK nanti masih terdapat Pos-pos Ayat Penerimaan yang belum dapat dinaikkan.

- 2) Berkenaan dengan penerimaan pajak pengambilan sarang burung, Pihak Eksekutif akan merasa sangat senang apabila Asosiasi Pemilik Sarang Burung dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian perlu kiranya diketahui, bahwa suatu perkumpulan atau asosiasi apapun, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah.

Keberadaan suatu asosiasi tidak dapat dipaksakan oleh kekuasaan Pemerintah, meskipun Pemerintah mempunyai wewenang untuk membina kehidupan suatu asosiasi, agar dapatnya memberikan peran sertanya secara optimal.

Oleh karena itu terhadap saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar Eksekutif memberikan beban tanggungjawab kepada asosiasi sarang burung atas suatu target penerimaan pajak sesuai dengan keberadaan sarang burung di masing-masing pemiliknya, nampaknya masih perlu dipertimbangkan secara bijak dan lebih seksama, mengingat :

- a) hakekat dari eksistensi asosiasi tersebut sebagai suatu lembaga yang mandiri.
- b) sistem pemungutan pajak yang menganut azas *self assesment*.

3) Terhadap penerimaan retribusi uang leges, uang sempadan jalan atau ijin bangunan, retribusi kartu ternak, retribusi surat ijin tempat usaha dan retribusi pemeriksaan kesehatan ternak yang tidak dapat naik dalam anggaran 1997/1998, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Uang Leges tidak ada kendala dan hambatan dalam pemungutan, namun volume pelayanan masyarakat sebagai tolok ukur potensi retribusi relatif tetap.
- b) Uang Sempadan Jalan atau Ijin Bangunan kendala dan hambatan utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat akan kemanfaatan perijinan ini dalam hubungan Hukum Tata Pemerintahan, sehingga sebagian besar bangunan yang dipersyaratkan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum seluruhnya dimohonkan ijin oleh pemiliknya.
- c) Retribusi Kartu Ternak telah dipungut secara optimal sesuai dengan data potensi yang ada.
- d) Retribusi Surat Ijin Tempat Usaha.

Kendala pemungutan retribusi ini terletak pada tingkat kemampuan sosial ekonomi subyek retribusi yang relatif rendah, sehingga mereka lebih mengutamakan peningkatan kemampuan berusahanya.

Dalam hubungan ini perlu dipahami, bahwa kewajiban memiliki ijin tempat usaha bagi suatu perusahaan hanya satu kali dan berlaku selama usaha tersebut masih beroperasi.

Dengan demikian cakupan obyek retribusi ini terbatas pada pendirian usaha baru dan retribusi uang pendaftaran ulang (heregistrasi) yang jumlahnya relatif kecil.

e) **Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak.**

Kendala retribusi ini terletak pada kondisi dan potensi obyek yang terbatas, karena pemasaran ternak besar di Pasar Hewan Daerah cenderung mengalami penurunan, sehingga dampak dari adanya ternak dan daging impor yang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas.

4. **Bagian Laba BUMD**

Harapan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar bagian laba BUMD dalam PAK nanti dapat ditingkatkan lagi dukungannya terhadap Pendapatan Asli Daerah kita, disampaikan terima kasih, dan dengan sendirinya akan disesuaikan dengan situasi/perjalanan sampai dengan PAK nanti.

5. **Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

Penganggaran PBB untuk sementara masih disamakan dengan realisasi SKB tahun 1996/1997, namun demikian dalam PAK nanti akan disesuaikan penganggarnya sesuai dengan Ketetapan SKB tahun 1997/1998.

6. **Pos Sumbangan dan Bantuan**

Berakaitan dengan Pos Sumbangan dan Bantuan dapat disampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah mutlak diperlukan dana yang cukup besar.

Menyadari akan hal tersebut guna mencukupi Keuangan Daerah, maka melalui kebijaksanaan Keuangan Negara Pemerintah Pusat setiap tahunnya telah menyalurkan berbagai dana ke Daerah berupa Sumbangan dan Bantuan dalam bentuk Subsidi Daerah Otonom dan program-program Inpres Pembangunan yang proporsinya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Daerah lainnya.

Adapun standart penyesuaian pemberian Sumbangan di dasarkan pada kebutuhan riil Pemerintah Daerah Tingkat II sedangkan untuk

Bantuan Inpres Dati II diberikan atas dasar jumlah Penduduk dan luas Wilayah.

7. Belanja Rutin.

Himbauan dan saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar Eksekutif tetap menggunakan Anggaran Rutin secara proporsional yang disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan rutin Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi program Eksekutif bahwa pengeluaran rutin dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil setiap Dinas/Lembaga/Satuan kerja Daerah dengan prioritas diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat.

8. Himbauan Yang terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhadap volume Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1997/1998 ini kenaikannya baru 5,94 %, diharapkan dalam Perubahan Keuangan nanti dapat mencapai 10 % disampaikan terima kasih. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pihak Eksekutif terus berupaya untuk menaikkan volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dengan diketahuinya besar plafound dari berbagai sumber dana nantinya akan mendukung volume Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Perubahan Anggaran Keuangan nanti.

#### **SUB SEKTOR KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL**

Permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap Sub Sektor ini yang dananya dialokasikan sebesar 35 Juta Rupiah dapat disampaikan :

- a. Dari dana tersebut adalah untuk pembinaan, pelatihan pengelolaan KUD, pembenahan KUD dan penuntasan KUD. Sedangkan untuk pelatihan adalah sarannya seluruh KUD (29 KUD) di Kabupaten Lamongan.

Fokus kegiatan adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tentang manajemen dan akuntansi koperasi sehingga benar-benar akan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan.

- b. Sedangkan kendala bagi KUD mandiri adalah masih memerlukan dana, karena sebagian besar KUD di Kabupaten Lamongan dalam keadaan memprihatinkan.

Hal ini salah satu faktornya adalah masih banyaknya tunggakan, tetapi Tim Tingkat II tetap mengupayakan untuk mengadakan pembenahan sampai tunggakan selesai.

Salah satu langkah Tim Tingkat II Lamongan adalah mengadakan pemanggilan para penunggak disamping untuk mengadakan pembinaan dan mengadakan penagihan juga menginventarisasi posisi masing-masing tunggakan kredit program.

## **VI. SEKTOR TRANSPORTASI**

### **SUB SEKTOR PRASARANA JALAN**

1. Terhadap permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwa yang bertanggungjawab terhadap galian pada jalan Propinsi maupun jalan Kabupaten adalah Dinas Instansi Terkait yang terdiri dari Dinas PUD, Dinas PU Bina Marga, Perumtel dan PDAM. Mengenai rencana sistem Pembangunan satu saluran saat ini belum bisa dilaksanakan mengingat lebar jalan, utamanya dalam Kota masih sempit sehingga perlu pelebaran jalan sesuai dengan garis sempadan jalan.
2. Adapun himbauan terhadap mutu dan kualitas pada proyek pemeliharaan berkala Dradah-Bluluk menjadi perhatian Eksekutif. Namun perlu pula diketahui bahwa konstruksi proyek pemeliharaan berkala lebih baik daripada konstruksi proyek pemeliharaan rutin, sehingga umur proyek pemeliharaan berkala akan lebih lama dibanding dengan pemeliharaan rutin.

3. Saran mengenai penanganan tembok penahan tanah di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame hal tersebut menjadi program Eksekutif, saat ini telah diusulkan ke Tingkat I melalui sumber Dana Subsidi Daerah Bawahan (SDB).

Sedangkan untuk penanganan sementara akan segera dikerjakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sukorame - Slaji.

4. Mengenai penanganan jembatan Kuwurejo, diprogramkan sesuai dengan prioritas dan kemampuan dana yang tersedia, karena dana yang diperlukan untuk pembangunan jembatan tersebut cukup besar dengan panjang jembatan 25,5 M lebar 4 M. Namun demikian dari pertimbangan teknis kondisi jembatan tersebut masih bisa dilalui kendaraan sampai batas 2 tahun lagi.
5. Adapun penanganan dinding penahan tanah yang di ruas jalan Sugio - Lamongan saat ini sedang diusulkan ke Tingkat I melalui sumber dana Subsidi Daerah Bawahan (SDB).
6. Atas pertanyaan dan saran yang disampaikan Fraksi Demokrasi Indonesia dan Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah untuk peningkatan jalan Widang - Gresik dijelaskan sebagai berikut :
  - Dari 52,2819 Ha tanah yang dibebaskan untuk proyek peningkatan jalan Widang - Gresik (untuk Wilayah Kabupaten Lamongan) telah selesai dimusyawarahkan besar ganti ruginya. Para pemilik tanah maupun bangunan telah bersedia menerima besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemerintah (Pimpro). Pada Tahun Anggaran 1996/1997 telah tersedia dana/anggaran untuk pembebasan tanah lebih kurang 15,3 Milyard rupiah yang sudah dibayarkan ganti rugi lebih kurang 9,5 Milyard rupiah atau 61 %.

Sedangkan sisa anggaran lebih kurang 5,8 Milyard rupiah (39%) masih dalam proses pembayaran dan penyelesaian administrasi dan diharapkan pada akhir bulan Maret 1997 pemberian ganti rugi telah tuntas pembayarannya.

- Mengenai pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah maupun bangunan, yang sebagian besar bangunan dan tanahnya terkena proyek sedangkan sisanya dianggap tidak layak dihuni, maka atas kesepakatan dalam musyawarah antara pemilik bangunan dengan Pimpro akan dibebaskan seluruhnya.

7. Himbauan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap penanganan beberapa masalah untuk kelancaran arus transportasi dan membuka isolasi, masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Untuk mendukung kelancaran arus transportasi jalan Lonjong-Dukuhtunggal Kecamatan Glagah telah diperbaiki sementara dengan urugan sirtu yang kelanjutannya diprogramkan tahun 1998/1999.
  - b. Jalan Peti'in - Payaman telah menjadi perhatian Eksekutif untuk diprogramkan pada tahun mendatang sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana.
  - c. Jalan Desa Sempu - Sidodowo Kecamatan Modo dan Jalan Glagah Jatirenggo adalah merupakan jalan Desa. Untuk upaya perbaikan jalan tersebut penanganannya akan dikaitkan dengan usulan lokasi proyek Ronggohadi.
  - d. Jalan Turi - Kiringan merupakan Jalan desa, pada tahun ini diusulkan menjadi jalan Kabupaten, karena keterbatasan dana belum bisa diperbaiki namun demikian akan mendapat perhatian dan diprogramkan untuk tahun mendatang.
  
8. Atas saran Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap penanganan jalan AMD disampaikan terima kasih dan untuk kemungkinan pelaksanaannya perlu adanya pengkajian lebih lanjut.

9. Adapun untuk penanganan ruas-ruas jalan :

- a. Jalan tembus Turi - Kiringan - Dibe,
- b. Jalan Pasar Kembangbahu - Pasar Kalipang.
- c. Jalan PUD Kedungpring - Dradah,
- d. Penanganan Jalan Lamongan - Sugio.

akan diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan urutan prioritas dan kemampuan dana yang tersedia.

- e. Adapun pemeliharaan Jalan Soko - Karangbinangun dengan dana Rp. 162.000.000,00 volume yang akan dibangun sepanjang 2.700 Meter dengan lebar perkerasan 4 Meter
- f. Tindak lanjut daripada pembangunan jalan lingkar jalan Sumargo - Deket, ditangani lewat dana bantuan APBD I Tahun Anggaran 1996/1997 melintasi rel Kereta Api dekat pertigaan Deket, yang sekarang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

10. Himbauan Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang pengadaan dan pemasangan rambu-rambu/spot Light di jembatan-jembatan yang sudah rusak maupun yang sudah hilang di jalan-jalan Kabupaten disampaikan terima kasih. Adapun pengadaan selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap.

## **SUB SEKTOR TRANSPORTASI DARAT**

1. Himbauan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar Sub Terminal di Ngimbang difungsikan sebagaimana mestinya, telah menjadi perhatian Eksekutif antara lain dengan membangun kios yang diharapkan dapat menjadi daya tarik penumpang dan kendaraan masuk pada pangkalan yang disediakan. Sudah barang tentu langkah ini akan diikuti dengan langkah penerbitan lainnya, sehingga sarana tersebut dapat berfungsi secara optimal.

2. Keberadaan Sub Terminal (Terminal Lama) Babat yang kondisinya berkembang seperti saat ini, kiranya pula dimaklumi oleh semua pihak. Bermunculannya kios-kios baru yang berada di dalam lokasi Sub Terminal tersebut merupakan gejala sosial ekonomi yang tidak dapat dihindari, oleh karena belum sepadannya kemampuan penyediaan fasilitas perdagangan umum dengan laju perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang menuntut pelayanan kesempatan bekerja dan berusaha. Berkenaan dengan itu Pihak Eksekutif telah mengambil langkah-langkah penertiban di lokasi tersebut, akhirnya kegiatan kios-kios yang ada, tidak mengganggu kegiatan pangkalan parkir. Sementara itu mengenai keberadaan kios baru tersebut diusahakan secara swadaya oleh para PK-5/Penghuni yang telah ada pernyataan dari pihak Pemerintah.
3. Mengenai bermunculannya kios-kios baru di Pangkalan parkir Babat merupakan kegiatan liar, Pemerintah Daerah hingga saat ini belum merencanakan dan atau melaksanakan pembangunan kios dimaksud. Oleh karena itu Pihak Eksekutif menyampaikan terima kasih atas informasi dan saran yang disampaikan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan.  
Selanjutnya mengenai informasi mengenai biaya sebesar 700 ribu rupiah per kios akan diusut dan dilakukan cheking kebenarannya, seraya mengambil langkah-langkah penertiban dengan tetap memperhatikan situasi sosial yang sedang berlangsung.
4. Terhadap saran Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan dalam rangka membuka jalan trayek baru Tanjung Kodok - Lamongan - Mojokerto disampaikan terima kasih. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa pada jalur jalan tersebut sudah dilayani oleh Mobil Penumpang Umum / kendaraan angkutan Pedesaan, yang jumlahnya tidak sedikit, untuk itu dalam mewujudkan rencana tersebut maka perlu adanya sosialisasi dan juga selaras dengan adanya program TWO IN ONE (penggantian 2 MPU menjadi 1 Bus Mini) sehingga perlu tahapan di dalam merealisasikannya

## VII. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

### SUB SEKTOR ENERGI/LISTRIK PEDESAAN

1. Masalah kelistrikan Desa di Kecamatan Modo sebagaimana ditanyakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Listrik Masuk Desa di Desa Jegreg, Kecamatan Modo sudah dapat diselesaikan fisik proyeknya dan pada tanggal 27 Mei 1996 secara resmi telah menyala.
  - b. Listrik Masuk Desa di Dusun Parengan dan Dusun Graman, Desa Sambangrejo, Kecamatan Modo (bukan Desa Parengan dan Desa Graman), dapat dijelaskan sebagai berikut :
    - Alokasi pengadaan tiang beton berikut pemancangannya dilaksanakan melalui kontrak induk PLN Pusat dengan dana APBN Tahun 1996/1997 yang dalam hal ini pengiriman tiang betonnya masih dalam proses oleh pihak kontraktor.
    - Sedangkan jaringannya diusulkan masuk tahun anggaran 1997/1998.
2. Terhadap permohonan penjelasan dari Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang proyek pemasangan lampu penerangan jalan umum yang dalam RAPBD Tahun 1997/1998 dialokasikan sebesar 35 Juta Rupiah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan analisa dan perhitungan dengan menyesuaikan adanya kenaikan harga lampu merkuri, maka diupayakan oleh Pihak Eksekutif masing-masing Ibu Kota Kecamatan yang mendapat alokasi dana proyek penerangan jalan umum sebanyak 5 unit lampu per Ibu Kota Kecamatan.

b. Sambil menunggu realisasi pembangunan jalan Surabaya-Babat Pihak Eksekutif tetap memprogramkan lampu penerangan jalan umum pada Ibu Kota Kecamatan yang berada pada jalur jalan raya Surabaya-Babat.

3. Permohonan informasi terhadap proyek pendamping PLTD/PLTS dapat disampaikan bahwa, proyek penyediaan dana pendamping bantuan PLTS/pengadaan PLTD dianggarkan lewat dana Inpres Daerah Tingkat II Tahun 1996/1997 sebesar 20 Juta Rupiah.

Dari dana tersebut dibelikan 2 unit PLTD masing-masing 10 KVA untuk 2 Desa di Kecamatan Laren :

1. Dusun Lengor Desa Pelangwot 1 unit PLTD.
2. Dusun Sapan Desa Dateng 1 unit PLTD.

Sedangkan dana pendamping untuk bantuan PLTS digunakan untuk menunjang proyek bantuan PLTS dari BPPT di lokasi proyek Tamyamsang Kecamatan Karanggeneng.

Pada Tahun Anggaran 1997/1998 dialokasikan sebesar 10 Juta Rupiah direncanakan untuk Desa atau Dusun yang sangat sulit dijangkau dengan jaringan listrik PLN, sedangkan untuk PLTS direncanakan ditempatkan di Dusun Sidodadi, Desa Kranji, Kecamatan Paciran.

Berdasarkan penjelasan dari Tingkat I Jawa Timur bahwa dana pendamping PLTD/PLTS ini harus disetor kepada Tingkat I Cq Biro Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur lewat Bank Jatim (BPD Jawa Timur).

4. Sedangkan terhadap permasalahan kelistrikan Desa di Desa Plososetro, Kecamatan Pucuk sebagaimana ditanyakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dapat dijelaskan bahwa :
- a. Program kelistrikan desa di Desa Plososetro, Kecamatan Pucuk berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) Tingkat I Jawa Timur disetujui untuk Tahun Anggaran 1997/1998.

- b. Sedangkan keuangan yang sudah dihimpun, saat ini oleh Panitia Kelistrikan Desa Desa Plososetro disimpan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dan sebagai upaya pengamanan keuangannya dapat diambil kembali/dicairkan oleh Panitia setelah mendapat rekomendasi dari pihak PLN bahwa proyek sudah dimulai pengerjaannya.

## VIII. SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH

### SUB SEKTOR PARIWISATA

1. Atas Himbauan Yang terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar diupayakan kiat-kiat supaya income tempat Wisata Waduk Gondang lebih meningkat, disampaikan terima kasih.  
Hal ini Pihak Eksekutif sudah menyusun rencana dan program secara bertahap antara lain :
  - a. Rencana pengadaan perahu motor, sepeda air dan tempat pemancingan dengan tidak mempengaruhi kondisi volume air sebagai irigasi pertanian .
  - b. Mengadakan hiburan-hiburan tertentu disesuaikan dengan moment-moment yang tepat dan tidak menambah beban masyarakat.
  - c. Menyusun Rencana jangka panjang dengan membuat jalan keliling Waduk sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan dengan bersepeda gunung atau berkuda.
  - d. Menambah fasilitas-fasilitas lainnya yang menarik wisatawan.
2. Informasi yang pernah diterima oleh Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai keluhan keberahan dari pengunjung di Gua Maharani pada saat mereka masuk bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak dapat disampaikan bahwa daya hisap blower yang terpasang diperhitungkan sesuai volume ruang Gua dengan pengunjung maximum 20 orang setiap kali masuk. Namun kenyataannya sangat sulit mengendalikan pada saat padat pengunjung dengan waktu yang terbatas. sedang-

kan untuk diadakan tambahan blower dengan kapasitas yang lebih besar, sekaligus merupakan blower cadangan pada saat salah satu blower mengalami perbaikan atau service menjadi perhatian Eksekutif sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggarannya.

## SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAERAH

1. Saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan, agar sebelum jaringan kabel yang ditanam selesai dikerjakan hendaknya jaringan kabel yang ditiang tidak diputus terlebih dahulu disampaikan terima kasih.

Pada kesempatan ini diinformasikan bahwa proyek kabel tanah sebesar 10 Ribu satuan sambungan ini tujuannya adalah :

- a. Menambah kapasitas kabel yang ada guna memenuhi permintaan pasang baru yang makin lama makin meningkat, serta mengganti kabel lama yang sudah "Out of Spec" (kadaluarsa) sehingga gangguan cepat teratasi.
  - b. Switch over dari pengganda saluran (pair gain) ke saluran fisik sebenarnya untuk mengantisipasi banyaknya gangguan yang tidak cepat teratasi, karena harus menunggu suku cadang dari Jakarta.
2. Permohonan Penjelasan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang program perluasan dan pelayanan PT. TELKOM Tahun 1997/1998 adalah sebagai berikut :
    - a. Lamongan Kota menambah kabel tanah 10 Ribu satuan sambungan karena kondisi saluran dalam Kota saat ini sudah habis dan sebagian sudah kadaluarsa
    - b. Program percepatan :
      - 1). DCS (Digital Carrier Subscriber) narik kabel fiber optik (fo) dari Babad untuk lokasi :
        - Kecamatan Sugio
        - Kecamatan Kedungpring
        - Kecamatan Ngimbang.

- 2). Narik kabel udara dari Brondong 60 satuan sambungan ke Laren dan Solokuro.
  - 3). Narik kabel udara Rural Modo ke :
    - Kecamatan Bluluk
    - Kecamatan Sukorame
- c. Program Rural (Sistim Hubungan radio) untuk 12 lokasi seperti:
- Kecamatan Karangbinangun
  - Kecamatan Glagah
  - Kecamatan Kembangbahu
  - Kecamatan Karanggeneng dan Kalitengah
  - Kecamatan Mantup
  - Kecamatan Kedungpring
  - Kecamatan Sambeng
  - Kecamatan Sugio
  - Kecamatan Modo
  - Kecamatan Laren
  - Kecamatan Ngimbang
  - Kecamatan Sekaran.

## **IX. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN**

### **SUB SEKTOR PEMBANGUNAN KOTA.**

1. Himbauan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar batas Wilayah antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang dibuat tugu batas Wilayah yang berada di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang hal tersebut dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Maret 1997 di Surabaya bahwa pengaturan dan penyeragaman tugu batas Wilayah antar Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan akan diseragamkan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur yang dalam waktu singkat akan diterbitkan, dimana pengaturan bentuk dan penempatan tugu batas tersebut akan dibentuk suatu Tim masing-masing Tingkat II.

2. Saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan dalam rangka mempertahankan predikat Kabupaten Lamongan sebagai Kota Adipura agar selalu diadakan pembersihan saluran pembuangan air dalam kota, hal tersebut telah menjadi program Eksekutif bahwa kegiatan pembersihan saluran air baik di dalam perkampungan maupun di jalan protokol secara rutin telah dilaksanakan pembersihannya baik oleh masyarakat maupun oleh Dinas tehnis.
  
3. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan mengenai penanganan normalisasi Kali Plalangan, Kali Mengkuli dan Kali Pengaron dapat disampaikan bahwa :
  - a. Usulan untuk penanganan penyelesaian normalisasi kali-kali yang dimaksud telah kami lakukan, namun karena keterbatasan dana yang ada pada tahun anggaran 1997/1998 baru untuk kelanjutan normalisasi Kali Mengkuli yang memperoleh dana.
  - b. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat tentang pola eksploitasi pengoperasian Dam/Pintu air tersebut, dan mengkaji lebih lanjut hal-hal yang diperlukan dalam upaya agar dapat mengurangi pendangkalan yang terjadi.
  - c. Terima kasih atas dukungan Anggota Dewan semoga dukungan ini termasuk juga persiapan di lapangan yang dapat menopang kelancaran usulan yang kita lakukan, sehingga bisa segera terealisasi.
  
4. Mengenai pembangunan Gapura Batas Kota yang berada di Selatan Kota Lamongan yaitu di Desa Jotosanur dan Pembangunan pertamanan yang dilengkapi dengan lampu mercury, hal tersebut sejalan dengan program Eksekutif yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai skala, prioritas dan kemampuan anggaran.

#### **SUB SEKTOR PEMBANGUNAN DESA**

Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia terhadap Sub Sektor ini dapat disampaikan bahwa :

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan sampai saat ini baik yang berada di Kota maupun Pedesaan belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Namun demikian gambaran sementara hasil evaluasi pelaporan program IDT pada akhir tahun 1996 dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Sasaran program IDT meliputi 70 Desa jumlah KK kurang lebih 7.615 KK dan jumlah jiwa kurang lebih 32.242 jiwa.
  - b. Keluarga tertinggal yang sudah melunasi pinjaman kepada kelompok dan maupun besar usaha/kegiatannya mencapai kurang lebih 989 KK atau kurang lebih 4.191 jiwa.
  
2. Sedangkan mengenai kriteria Keluarga Miskin/keluarga tertinggal dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Tentang Pendapatan :

Pendapatan Perkapita perbulan Rp. 15.000,00 untuk desa Pedesaan (Rural) dan Rp. 27.500,00, untuk desa Perkotaan (Urban) dan tidak ada bantuan sumber pendapatan lain.
  - b. 1). Tentang Pangan :

2.100 Kalori per orang setiap hari dengan rincian : makan kurang 2 kali sehari, jumlah dan jenis makanan pokok yang biasa ada/berlaku di desa ini misalnya nasi, sayur dan lauk-pauk (tahu/tempe/ikan asin/telor).
  - 2) Tentang Perumahan :

Perumahan tergolong rumah tidak sehat, dengan ciri-ciri :

    - Lantai rumah lembab terbuka dari tanah.
    - Dinding rumah lembab terbuat dari bahan yang tidak kuat dan awet tanpa jendela dan ventilasi (lubang angin).
    - Atap rumah yang mudah terbakar dan mudah bocor.
    - Ruang rumah hanya satu ruang saja tanpa sekat, ruangan tidur yang terlalu sempit.
    - Tidak mempunyai tempat pembuangan sampah,
    - Kandang ternak masih jadi satu ruangan dengan rumah induk.

## 3) Tentang Sandang :

Kebutuhan sandang tidak sesuai dengan peruntukannya (Gantung Kepuh).

## 4) Kesehatan

Ada anggota keluarga yang sakit khususnya balita/ibu hamil lebih dari 3 hari tidak dibawa ke Puskesmas/tenaga medis/modern.

## 5) Pendidikan.

Ada anggota keluarga yang usia sekolah (7 s/d 12 tahun) tidak sekolah/putus sekolah SD/ sederajat, dan ada anggota keluarga usia kerja tidak punya ketrampilan serta tidak mempunyai kesempatan/peluang pengembangannya.

### **SUB SEKTOR PEMUKIMAN.**

Usulan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan agar Mess Anggota DPRD dibangun yang memadai dan ditempatkan di Jalan Kusuma Bangsa atau Jalan Sunan Giri sehingga letaknya berdekatan dengan perumahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan terhadap bangunan Mess lama untuk dijual, disampaikan terima kasih dan menjadi perhatian Eksekutif untuk diadakan pengkajian kemungkinannya sesuai skala prioritas dan kemampuan dana.

## **X. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA.**

### **SUB SEKTOR PENDIDIKAN.**

1. Mengenai himbauan dari Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan dapat mengalokasikan dana untuk pemberian bea siswa yang memadai bagi siswa-siswa yang berprestasi baik dibidang Akademis maupun Ekstrakurikuler bagi para siswa dari tingkat dasar sampai ting-

kat menengah, melalui KANDEPDIKBUD Kabupaten Lamongan telah menyalurkan bantuan dari berbagai pihak antara lain :

a. Bagian proyek bea siswa dan pembinaan kesiswaan Kanwil DEPDIBUD Propinsi Jatim Tahun Pelajaran 1996/1997 :

- Untuk SD : 249 anak @ 15 ribu rupiah per bulan
- Untuk SLTP : 88 anak @ 20 ribu rupiah per bulan
- Untuk SLTA : 68 anak @ 25 ribu rupiah per bulan
- Untuk anak SLTP yang sudah melanjutkan ke SLTA : 6 Anak @ 25 ribu rupiah per bulan.
- Untuk bea siswa khusus : 3 Anak 110 ribu rupiah per bulan.

Penyaluran dana tersebut lewat Kantor Pos dan Giro dengan tujuan ganda untuk menggalakkan kebiasaan menabung.

b. Bea Siswa bantuan biaya Pendidikan (BANBIDIK) dari Kanwil DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur :

- Untuk SD 20 Anak @ 60 ribu rupiah per tahun
- Untuk SLTP 70 Anak @ 90 ribu rupiah per tahun

c. Bantuan kawan asuh dari Jaringan DEPDIBUD Kabupaten Lamongan

- SMP terbuka : 2 Anak @ 150 ribu rupiah per tahun
- Untuk SLTP : 13 Anak @ 70 ribu rupiah per tahun
- Untuk SLTA : 10 Anak @ 90 ribu rupiah per tahun

d. Adapun yang masih dalam proses usulan dari KANDEP DIKBUD Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Dari DIRJEN DIKDASMEN DEPDIBUD Pusat Jakarta untuk Siswa SD/SLTP/SLTA NEGERI/SLTA SWASTA sebanyak 15 Siswa dalam rangka pembinaan bakat dan prestasi siswa terdiri dari :

- Tingkat SD/MI : 5 Siswa
- Tingkat SLTP : 5 Siswa
- Tingkat SLTA : 5 Siswa

Adapun besarnya dana yang akan diterimakan kepada siswa akan ditentukan oleh Pusat.

Perlu kami tambahkan penjelasan bahwa sementara ini pihak Eksekutif dalam rangka untuk merangsang prestasi belajar khususnya bagi siswa tingkat SD pada tahun anggaran 1995/1996 Pihak Eksekutif mengadakan lomba seleksi nilai danem tertinggi bidang studi IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia dan sebagai juara adalah :

Bidang studi : Bahasa Indonesia

1. Yuli Viama, SDN Glagah II, Kecamatan Glagah Juara I
2. Suliani, SDN Baturono II, Kecamatan Sukodadi Juara II
3. Mashudan Abdul, SDN Deketagung, Kec. Sugio Juara III

Bidang studi : Matematika

1. Juwono Catur Purwono, SDN Sukorejo II, Lamongan Juara I
2. Wahyudi, SDN Jatirenggo, Kec. Glagah Juara II
3. Choiriyah, SDN Sumberejo, Kec. Tikung Juara III

Bidang studi : IPA

1. Erik Bistari Rianti Apriliana, SDN Bulutengger, Sekaran Juara I
2. Noman Krisna Martasena, SDN Sukorejo, Lamongan Juara II
3. Vitriyah Yuliati, SDN ~~Banteng~~putih, Tikung Juara III

*Batu*

2. Permohonan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar Pemerintah Daerah menganjurkan dan mengusulkan bagi para Guru Wanita yang beragama Islam dan Pegawai Negeri untuk mengenakan busana Muslimah dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pakaian Seragam Dinas para Guru sudah ditetapkan berdasarkan Surat Instruksi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1984 Nomor : 48/I/04.O/D.V.84/INSTR Perihal penggunaan Pakaian dinas (PSH), Tanda Pengenal, Lencana KORPRI dan Insegne Lambang DEPDIKBUD sehingga dengan demikian pelaksanaan Pakaian Dinas Guru harus menyesuaikan dengan Instruksi dimaksud

(sebagaimana Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam rangka Rapat Paripurna II Tahun 1996/1997 DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 tanggal 21 Oktober 1996).

- b. Sedangkan untuk Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas, yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 217 Tahun 1992 yang mengatur tentang Warna, Bentuk dan penggunaannya. Sedangkan ketentuan Kepegawaiannya telah diatur oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk memberikan kebijaksanaan (sebagaimana Jawaban Eksutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna III Tahun Sidang 1996/1997 DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam Pembahasan 22 Rancangan Peraturan Daerah Tanggal 1 Pebruari 1997).
3. Masalah peningkatan kualitas tenaga Guru Swasta pada Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaijah dan Madrasah Tsanawijah bahwa untuk pelaksanaan kualitas Guru Swasta masih dalam tahap informasi awal dari Kanwil DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur (KABID PANDAIS) untk Tahun Anggaran 1997/1998 akan dilaksanakan Program penyetaraan Program D.II bagi Guru MI Swasta. Dalam pelaksanaan penyetaraan D.II belum pernah disuratkan baik berupa juklak maupun juknisnya, sehingga untuk target berapa guru yang akan diikutkan dalam pelaksanaan progran penyetaraan D.II bagi Guru MI Swasta juga belum tahu. Untuk mempersiapkan pelaksanaan penyetaraan D.II bagi Guru Swasta maka Kantor DEPAG menginformasikan kepada PPAI untuk mengadakan penda-taan bagi Guru Swasta yang akan diikutkan Program penyetaraan D.II.

4. Terhadap harapan dari Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan agar diupayakan langkah kebijaksanaan Pemerataan penempatan tenaga Pendidik tanpa menimbulkan gejolak, disampaikan penjelasan sebagai berikut :

Untuk rencana penataan penempatan tenaga Pendidik/Guru SD hal tersebut adalah sejalan dan sudah menjadi pemikiran pihak Eksekutif. Adapun langkah-langkah yang sudah ditindak lanjuti sampai dengan saat ini adalah mengadakan pendataan tentang Bezetting dan formasi pada masing-masing Lembaga Sekolah Dasar se Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan perpaduan antara jumlah kelas dengan jumlah murid dalam rangka untuk pemerataan penempatan tenaga Pendidik.

5. Mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Jajaran DEPDIKBUD, Kabupaten Lamongan tahun 1996 sepenuhnya adalah Wewenang Pemerintah/DEPDIKBUD Pusat. Sehingga kewenangan kami hanya terbatas mendaftarkan Calon Test, memberi Kode Test, Melaksanakan Test yang bahannya diterima dari Kantor Wilayah DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur berupa Dokumen rahasia, yang baru dapat dibuka dengan disaksikan Petugas dari POLRI pada waktu hari H.

Tentang adanya tenaga Pendidik yang telah lama mengabdikan sebagai sukwan tidak ada prioritas sebagaimana yang disampaikan oleh yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan, pihak Eksekutif sudah berusaha untuk membantu dengan cara, pada waktu mendaftar harap melampirkan :

1. Foto Copy Syah Surat Sukwan.
2. Foto Copy Syah Tanda ikut Test yang pernah diikuti.

Hal ini dilakukan dengan maksud agar menjadi pertimbangan pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan.

## **SUB SEKTOR KEBUDAYAAN DAERAH DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

1. Atas Saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan terimakasih bahwa pelaksanaan Upacara Tradisional Tutup Layang yang dirayakan setiap tahun pelaksanaannya diarahkan semakin berkualitas. Adapun yang menyangkut kegiatan Tradisional Tayub adalah merupakan kegiatan spontanitas sebagian nelayan yang pelaksanaannya hanya diberikan ijin pada saat Tutup Layang dan tetap dalam pengawasan pihak Muspika agar berjalan sesuai dengan norma dan kondisi .
2. Harapan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan agar alokasi dana bantuan pembangunan Gedung Juang 45 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dari APBD II dapat ditingkatkan, disampaikan terimakasih dan secara bertahap tahun ini dibantu sebesar 10 Juta Rupiah.  
Selanjutnya kami juga tetap mendukung untuk dapatnya diupayakan bantuan baik dari Pemerintah Tingkat I maupun dari Tingkat Pusat.

## **SUB SEKTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA.**

1. Atas saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap pendayagunaan Gedung Olah Raga untuk menampung para pemuda dan remaja untuk menyalurkan bakatnya dalam bidang olah raga dan seni untuk tahun-tahun mendatang akan menjadi perhatian Eksekutif.
2. Terhadap rencana pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional yang akan ditempatkan di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa :  
Sesuai dengan hasil Rakerda Koni di Jawa Timur tanggal 26 Desember 1996 di Surabaya yang dihadiri oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur, bahwa untuk pelaksanaan PON XV yang ditempati untuk kegiatan PON XV di Jawa Timur adalah :

- 1). Kodya Surabaya
- 2). Kodya Malang
- 3). Kabupaten Gresik
- 4). Kabupaten Sidoarjo
- 5). Kodya Kediri

3. Terhadap saran dan harapan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang pembangunan Lapangan Tenis semi tertutup dan Gedung Bulutangkis tertutup dapat disampaikan :

- a. Pembangunan Lapangan Tenis tertutup tersebut sebagai penataan Alun-alun Kota Lamongan yang akan dipersiapkan untuk upaya perolehan Adipura Kencana dalam tahun mendatang, sebagai salah satu kriteria Adipura Kencana bahwa Alun-alun Kota Lamongan harus terhindar dari sentel band sarana Olah Raga. Adapun design dan konstruksinya agar mengacu Lapangan Tenis Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kutisari, disampaikan terima kasih.
- b. Pembangunan Lapangan Bulutangkis tertutup ini dikarenakan di Lamongan nampaknya klub-klub Bulutangkis mulai tumbuh dan memerlukan pembinaan, sarana dan prasarana karena jadwal latihan klub Bulutangkis ini sering berbenturan dengan kegiatan lain yakni : Rapat-rapat Dinas, Pertemuan Organisasi Kemasyarakatan, Kegiatan hajatan dan lain-lain yang kesemuanya berkeinginan menempati Gedung Olah Raga. Untuk menghindarkan benturan jadwal latihan Bulutangkis, maka selayaknyalah dibangun Gedung Bulutangkis tertutup. Sedangkan Gedung Olah Raga yang ada ini diupayakan untuk dipakai kegiatan Olah Raga yang lainnya yakni : Volly Ball, Basket serta kegiatan Rapat-rapat Dinas, Pertemuan Organisasi Kemasyarakatan, Hajatan, Pameran, Kesenian dan lain-lainnya.

## **XI. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA.**

### **SUB SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.**

#### **1. Masalah Kependudukan.**

Disampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia atas perhatiannya terhadap Gerakan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Dati II Lamongan. Perlu kami jelaskan tentang perkembangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Dati II Lamongan sampai dengan Bulan Pebruari 1997 sebagai berikut :

##### **a. Pemerataan tingkat pelayanan.**

- Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan telah tersedia 107 buah Klinik Keluarga Berencana yang terdiri dari Klinik Keluarga Berencana Pemerintah 101 buah, 5 buah Klinik Keluarga Berencana swasta, dan 1 buah Klinik Keluarga Berencana ABRI (POLRI). Disamping itu masih ada institusi masyarakat yang membantu pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera antara lain 475 orang PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), 2.271 orang sub PPKBD dan 6.868 kelompok KKBS - RT. Adapun peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Dati II Lamongan adalah sebagai berikut :

Sampai dengan bulan Pebruari 1997 (April 1996 s/d Pebruari 1997).

Peserta Keluarga Berencana Baru semua metode : 41.856 peserta atau 106,60 % dari perkiraan permintaan masyarakat/target sebesar 39.265 peserta.

- Peserta Keluarga Berencana Aktif semua metode sampai dengan Pebruari 1997 sebesar 188.415 peserta atau 99,82 %, dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 188,763 peserta.
  - b. Pengamatan Saudara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia seperti itu tidak seluruhnya mengandung kebenaran. Karena untuk memperoleh kemakmuran ditempuh melalui proses yang panjang dan kerja keras, sehingga dengan demikian makin banyak kesibukan makin sempit waktu untuk santai berkumpul keluarga, yang pada akhir juga berpengaruh terhadap tingkat kelahiran anak. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik di Kabupaten Lamongan pada tahun 1995 angka kelahiran anak mencapai 2,3% dan pada tahun 1996 turun menjadi 2,28%. Sedangkan apabila dibandingkan tingkat kesejahteraan penduduk makin meningkat.
2. Permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap pelaksanaan pendataan penduduk di Kabupaten Dati II Lamongan oleh BKKBN dapat disampaikan bahwa pendataan keluarga tahun 1997 didasari atas Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Pusat Nomor 312/HK.011/D.3/1996 tanggal 26 Nopember 1996 yang pelaksanaannya dimulai tanggal 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Maret 1997. Hasil yang diharapkan dari pendataan tersebut adalah tersedianya data demografi, data kesertaan berkeluarga berencana dan tahapan keluarga sejahtera. Adapun pelaksanaan pendataan keluarga tahun 1997 di Kabupaten Lamongan sampai dengan Minggu ke 10 (tanggal 12 Maret 1997) telah tercapai 93,33 %.

Adapun data hasil pendataan keluarga dan pencapaian program Keluarga Berencana 1996 sebagai berikut :

Hasil pendataan keluarga pada tahun 1996 mencapai 275.227 keluarga, meliputi :

- Keluarga Pra sejahtera      sebanyak 167.749
- Keluarga Sejahtera I        sebanyak 35.474
- Keluarga Sejahtera II       sebanyak 30.864
- Keluarga Sejahtera III       sebanyak 20.570, dan
- Keluarga Sejahtera III plus sebanyak 20.570

Sedangkan pencapaian program Keluarga Berencana pada tahun 1996 dari sebanyak 225.732 pasangan usia subur, peserta KB aktif mencapai 183.234 pasang sehingga kesertaan untuk ber Keluarga Berencana mencapai 81,17%.

## **XII. SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA**

### **SUB SEKTOR KESEHATAN**

1. Terhadap permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang jumlah daya tampung RSUD Dr. Soegiri Lamongan, saat ini sebanyak 114 TT (Tempat Tidur) masing-masing :

- Paviliun KORPRI Bhineka Karya :
  - Klas Ia : 16 buah
  - Klas Ib : 4 buah
  - Klas II : 9 buah
- Rumah Sakit :
  - Klas II : 27 buah
  - Klas III : 59 buah

Sedangkan dibandingkan dengan perkembangan pasien yang sakit, yang seharusnya rawat inap dapat dilihat dari BOR (ratio tempat tidur yang terpakai). Perlu diketahui bahwa untuk RSUD Dr. Soegiri Lamongan BOR-nya tercapai 63,07%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Dr. Soegiri masih bisa menampung pasien sesuai dengan kapasitas tempat tidur.

2. Menanggapi pernyataan dan harapan tentang dibukanya Tempat Rawat Inap di Puskesmas Babat II dapat di sampaikan sebagai berikut :

a. Puskesmas Babat II merupakan bagian dari Puskesmas Babat I, yang oleh karena pengembangan program Puskesmas Babat terbentur lahan yang ada maka pengembangannya diarahkan ke Puskesmas Babat II, yang secara bertahap akan diwujudkan suatu Puskesmas Perawatan dengan kemampuan yang sama dengan Rumah Sakit Type D.

b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang disumbangkan oleh Puskesmas Babat selama ini adalah :

- sebelum ada Puskesmas Babat II, rata-rata 2 Juta 225 Ribu Rupiah per bulan.

- sesudah ada Puskesmas Babat II, rata-rata 4 Juta 225 Ribu Rupiah per bulan, maka ada kenaikan  $\pm 89,88\%$ .

c. Peningkatan pelayanan pada masyarakat sudah menjadi komitmen kami dengan program yang telah kami laksanakan.

3. Selanjutnya mengenai saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar pelayanan terhadap pasien yang mempergunakan fasilitas Askes dapatnya dilayani sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat disampaikan :

a. bahwa secara umum pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah senantiasa berpedoman pada :

- 1). Standar Pelayanan Medis.
- 2). Standar Pelayanan Keperawatan.
- 3). Standar Pelayanan Gawat Darurat.
- 4). Standar Manajemen dan Administrasi.
- 5). Standar Rekam Medik.

Tanpa mengadakan perbedaan terhadap status, usia, jenis kelamin, agama, kebangsaan maupun asal usul penderita.

2. Menanggapi pernyataan dan harapan tentang dibukanya Tempat Rawat Inap di Puskesmas Babat II dapat di sampaikan sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Babat II merupakan bagian dari Puskesmas Babat I, yang oleh karena pengembangan program Puskesmas Babat terbentur lahan yang ada maka pengembangannya diarahkan ke Puskesmas Babat II, yang secara bertahap akan diwujudkan suatu Puskesmas Perawatan dengan kemampuan yang sama dengan Rumah Sakit Type D.
  - b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang disumbangkan oleh Puskesmas Babat selama ini adalah :
    - sebelum ada Puskesmas Babat II, rata-rata 2 Juta 225 Ribu Rupiah per bulan.
    - sesudah ada Puskesmas Babat II, rata-rata 4 Juta 225 Ribu Rupiah per bulan, maka ada kenaikan  $\pm 89,88\%$ .
  - c. Peningkatan pelayanan pada masyarakat sudah menjadi komitmen kami dengan program yang telah kami laksanakan.
3. Selanjutnya mengenai saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar pelayanan terhadap pasien yang mempergunakan fasilitas Askes dapatnya dilayani sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat disampaikan :
  - a. bahwa secara umum pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah senantiasa berpedoman pada :
    - 1). Standar Pelayanan Medis.
    - 2). Standar Pelayanan Keperawatan.
    - 3). Standar Pelayanan Gawat Darurat.
    - 4). Standar Manajemen dan Administrasi.
    - 5). Standar Rekam Medik.Tanpa mengadakan perbedaan terhadap status, usia, jenis kelamin, agama, kebangsaan maupun asal usul penderita.

- b. Pelayanan bagi peserta PT Askes dan keluarganya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 Tahun 1994, sedangkan prosedur untuk mendapatkan pelayanan bagi peserta/keluarganya dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktur PT Askes Nomor 79/KEP/III.1/21/DAD/0296.
  - c. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan bagi peserta PT Askes/keluarganya di Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri Lamongan telah dibentuk Tim Pengendali, bahkan guna kemudahan bagi peserta, Kepala KPC Bojonegoro telah menempatkan 2 (dua) orang penghubung di Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri Lamongan.
4. Tentang pelayanan RSUD yang tidak manusiawi sehingga pasien lebih memilih ke Rumah Sakit swasta, maka kami perlu informasikan bahwa pada dasarnya 125 petugas Rumah Sakit setiap harinya bertemu dan memberikan pelayanan terhadap pasien. Dari sekian jumlah tersebut mungkin ada diantaranya yang berperilaku tidak ramah dan tidak manusiawi, hal demikian adalah wajar. Walaupun demikian kami selalu berusaha tidak henti-hentinya untuk melakukan pembinaan terhadap petugas Rumah Sakit terutama yang kurang baik. Ternyata dengan usaha tersebut, sudah mulai nampak hasilnya terlihat dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri Lamongan yang pada tanggal 15 Maret 1997 telah tercapai 101,49% dari rencana pendapatan 1996/1997.

#### **SUB SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Harapan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar adanya kesiapan Aparatur Pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya warung-warung ilegal yang sering digunakan praktek WTS liar di beberapa Desa misalnya Desa Peti'in Kecamatan Solokuro, Desa Padang Kecamatan Sukodadi, Watu Pokak Kecamatan Paciran

dan lain-lain, dapat disampaikan bahwa hal tersebut telah diinstruksikan kepada Camat setempat untuk bekerja sama dengan Aparat Desa, Tokoh-tokoh masyarakat dan Karang Taruna guna mengantisipasi adanya praktek-praktek WTS liar, disamping itu secara instansional dan gabungan selalu melakukan evaluasi guna penanganan lebih lanjut.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan terhadap pelanggaran pelacuran/WTS liar dalam upaya menghapuskan praktek-praktek tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 430 Tahun 1992 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Wanita Tuna Susila dan penekanan-penekanan pada Camat untuk mengadakan operasi pemberantasan WTS secara periodik sesuai dengan surat keputusan tersebut dan penekanan. Apabila para germo dan WTS masih membuka praktek prostitusi kembali akan dikenakan sanksi lebih berat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1968.

#### **SUB SEKTOR PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA.**

Harapan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan bahwa rencana pembangunan Gedung PKK yang baru yang ditempatkan di bekas pasar sepeda di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo agar sekaligus dirancang sebagai gedung wanita, disampaikan terima kasih dan menjadi perhatian Eksekutif.

### **XIII. SEKTOR AGAMA.**

#### **SUB SEKTOR AGAMA.**

1. Terhadap saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar bantuan untuk lembaga-lembaga Keagamaan dan tempat ibadah seperti masjid, Musholla, Pondok Pesantren dan lain-lain, dapatnya lebih ditingkatkan, disampaikan terima kasih. Pada tahun anggaran 1997/1998 pada Sektor ini dianggarkan sebesar Rp. 45 juta, adapun alokasi Anggaran tersebut sudah didasarkan atas pertimbangan kemampuan prospektif Keuangan Daerah. Namun demikian pihak Eksekutif telah berupaya untuk peningkatan anggaran guna pembangunan Lembaga-lembaga dan Tempat-tempat Ibadah dari bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

2. Adapun kegiatan LPTQ perlu diaktifkan lagi, hal ini sejalan dengan keinginan Eksekutif, sebagai upaya untuk mencari bibit yang baik LPTQ bekerjasama dengan Jamiatul Qurro Wal Huffadz Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk dukungan dananya diupayakan sesuai kemampuan.
3. Atas permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang timbulnya isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat tentang kebijaksanaan pelaksanaan proses pendaftaran calon Jamaah Haji tahun 1998.

Terlebih dahulu kita patut bersyukur Alhamdulillah berkat do'a dan bantuan dari semua pihak pada akhirnya proses pendaftaran haji sampai dengan pelaksanaan pemberangkatan jamaah Calon Haji tahun 1997/1417 H Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Mudah-mudahan sampai Jamaah Haji ke Tanah Air tidak ada satu halangan yang menghambat perjalanan mereka.

Sedangkan mengenai isu tentang adanya kebijaksanaan pelaksanaan pendaftaran Calon Jemaah Haji 1998 tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pendaftaran calon Jamaah haji tahun 1998/1418 H sampai saat ini belum dibuka, karena belum ada Keputusan Presiden yang mengatur masalah pendaftaran Haji tahun 1998 M/1418 H, khususnya yang menyangkut masalah besarnya Ongkos Naik Haji (ONH). Mengenai isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa pendaftaran haji tahun 1998 M/1418 H sudah dibuka dan jatahnya tinggal sedikit, itu berita yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini Departemen Agama belum pernah menerima pendaftaran Calon Jamaah Haji Tahun 1998 M/1418 H. Memang banyak Calon pendaftar Haji tahun 1998 M/1418 H yang datang ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan (PBUH) tetapi sifatnya hanya sekedar minta informasi dan konsultasi mengenai pendaftaran Calon Haji tahun 1998 M/1418 H, jadi bukan mendaftar haji tahun 1998 M/1418 H.

4. Tentang pembangunan gedung "Wisma Persaudaraan haji dan Pusat Ukhuwah Islamiyah" Lamongan, yang mana pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, Alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 40 persen lebih dan diharapkan dapat selesai sesuai dengan rencana sehingga segera dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Dakwah Islamiyah pada umumnya dan para Hujaj pada khususnya, hal ini sesuai dengan harapan pihak Eksekutif, adapun bantuan pembangunan sedang diupayakan dan menjadikan perhatian.

#### **XIV. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI.**

##### **SUB SEKTOR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAM TEHNOLOGI.**

Mengenai permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap Sektor ini yang pada RAPBD tahun 1997/1998 tidak mendapatkan alokasi dana, dapat disampaikan bahwa APBD tahun 1996/1997 sektor ini mendapat alokasi dana sebesar 75 juta rupiah yaitu untuk proyek Forum Orientasi Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Pembangunan Daerah (FO-PPTPD) dari Inpres Dati II, sedangkan tahun 1997/1998 ini tidak mendapat alokasi dana.

#### **XV. SEKTOR HUKUM**

##### **SUB SEKTOR HUKUM.**

1. Permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap bentuk dan sasaran Sektor Hukum Tahun 1997/1998 dengan dana sebesar 10 Juta Rupiah di sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Melalui penyuluhan dan sarasehan masalah-masalah Hukum pada umumnya dan proses peradilan Tata Usaha Negara pada khususnya, melibatkan :

- Aparatur Pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan dan Desa.
- Tokoh-tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi kemasyarakatan yang ada di Wilayah Kecamatan dan masyarakat pada umumnya.

Sasaran Pembangunan Hukum ini meliputi 25 Kecamatan dengan tujuan memberikan pendidikan dan menambah wawasan Hukum bagi warga masyarakat pada umumnya sekaligus memantapkan pemahaman pada Aparatur Pemerintah mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Untuk pengadaan dan pendistribusian produk-produk Hukum selama ini sudah dilakukan dengan Anggaran alokasi dana rutin setiap tahunnya.

## **XVI. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN**

### **SUB SEKTOR APARATUR PEMERINTAH**

1. Dukungan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendatang Bagian Pemerintahan Desa diberikan kendaraan roda 4 untuk operasional, disampaikan terima kasih dan hal tersebut telah menjadi program Eksekutif sesuai dengan urgensi dan skala prioritas.
2. Terima kasih atas saran dan himbauan dari Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, bahwa Pihak Eksekutif telah mempersiapkan sarana dan prasarana Perkantoran Kecamatan Sukorame.

Untuk kelengkapan pembangunan Kantor Mapolsek dan Koramil di Kecamatan yang baru telah direncanakan, dan pelaksanaannya masih menunggu persetujuan komando atas.

3. Permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang alokasi proyek bantuan pembangunan Kantor Desa yang dianggarkan sebesar 37 Juta 500 Ribu Rupiah dapat disampaikan bahwa sasaran bantuan pembangunan Kantor Kepala Desa diarahkan kepada Desa-desa yang belum mempunyai Kantor Kepala Desa, yang lokasinya yaitu di Wilayah Kecamatan Turi, Pucuk, Sugio, Kalitengah dan Sukodadi.
4. Mengenai usulan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan mengenai peningkatan status Perwakilan Kecamatan Sarirejo Kecamatan Tikung dan Maduran Kecamatan Sekaran menjadi Kecamatan Definitif, sudah diusulkan ke Tingkat I Jawa Timur dan Tingkat I Jawa Timur sudah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1995 Nomor : 138/6073/011/1995 perihal Usul Peningkatan Status Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan.

Selanjutnya menurut informasi dari Departemen Dalam Negeri diperkirakan dalam Tahun 1997 sudah menjadi Kecamatan Definitif. Sedangkan pada saat ini dipersiapkan sarana dan prasarana guna peningkatan peranan dan fungsi perwakilan Kecamatan, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Pelayanan kepada masyarakat serta pendayagunaan seluruh personil yang ada.

Berkaitan dengan persiapan tersebut juga diminta kepada Kepala Dinas/Instansi/Unit di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mulai mempersiapkan sarana, prasarana serta personil yang akan bertugas di 2 Kantor Perwakilan Kecamatan sebagaimana Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 6 Juni 1995 Nomor : 138/1030/410.011/1995 perihal persiapan Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan Definitif.

## SUB SEKTOR PENDAYAGUNAAN SISTEM DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Permohonan informasi Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang sasaran dan bentuk proyek Gerakan Disiplin Nasional yang dalam Tahun 1997/1998 dianggarkan sebesar 15 Juta Rupiah, dapat disampaikan bahwa :

*Program :*

Pendayagunaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional.

*Pola Pelaksanaan Program meliputi :*

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- b. Penerapan dan pengembangan secara operasional Gerakan Disiplin Nasional (GDN).
- c. Pembinaan Disiplin yang berkelanjutan dan konsisten.

*Sasaran yang hendak dicapai adalah :*

- a. Terwujudnya disiplin masyarakat yang tinggi dalam hal budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja dengan dipelopori oleh Aparatur Negara dalam hal ini prioritas Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- b. Peningkatan pembinaan, penyuluhan dan pengendalian, pengawasan Gerakan Disiplin Nasional.
- c. Peningkatan kepedulian Pemerintah Daerah dalam penanganan Gerakan Disiplin Nasional.
- d. Peningkatan koordinasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional untuk mendapatkan perolehan penghargaan dari Pemerintah.

*Tahapan pencapaian program meliputi :*

- a. Mengadakan inventarisasi/pendataan terhadap simpulan audit langkah kerja dari budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja serta pengendalian dan pengawasan.

- b. Bersama Dinas/Instansi Terkait mengadakan pembinaan, penyuluhan serta pengawasan dalam pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.
- c. Secara terpadu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan / perkembangan Gerakan Disiplin Nasional.
- d. Memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai.

*Sedangkan bentuk dari proyek ini adalah :*

- a. Pembuatan stiker Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja Desa/Kelurahan, Puskesmas, Cabang Dinas P dan K Kecamatan.
  - b. Pembuatan papan mekanisme.
  - c. Pembuatan slogan budaya tertib, bersih dan kerja di masing-masing Kecamatan.
  - d. Alat-alat Tulis Kantor.
  - e. Penyuluhan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa.
  - f. Penyuluhan kepada masyarakat.
  - g. Monitoring/evaluasi pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional pada Unit Kerja.
2. Mengenai informasi yang diterima oleh Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa Kepala Desa Kebalpelang Kecamatan Babat terlibat penggunaan uang Desa secara tidak sah disampaikan terima kasih dan saat ini sedang dalam penelitian dan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut.

## **XVII. SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA.**

### **SUB SEKTOR PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA.**

1. Memperhatikan pertanyaan dan saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan kami menyampaikan terima kasih.

Untuk diketahui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 104 Tahun 1988 bahwa RKPD Lamongan mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis siaran dan pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat II Lamongan. Kemudian dalam Instruksi Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia Nomor : 01/INST/DIRJEN/RTF/1985 tentang Penyelenggaraan Siaran oleh radio-radio siaran non RRI, dijelaskan bahwa siaran radio Pemerintah Daerah, bersifat Siaran Pedesaan yang melengkapi Siaran RRI dan tidak bersifat komersial.

Pada prinsipnya kerjasama pengelolaan siaran RKPD dengan pihak swasta tidak dibenarkan.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kami mengadakan kerjasama dengan pihak swasta sejauh tidak mengorbankan misi utama RKPD sebagai radio siaran penerangan pedesaan penunjang RRI, seperti tahun 1992 kami pernah melakukan kerjasama dengan PT. Balatif Farma Malang untuk barter pengadaan antena dan pemancar.

Untuk tahun anggaran 1995/1996 telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.1.100.000,- dan pada tahun 1996/1997 sebesar Rp.1.600.000,-.

2. Saran untuk mengadakan studi banding sangatlah kami hargai apalagi bila dikaitkan dengan peningkatan mutu siaran, dan hal ini sebenarnya telah sering dilakukan. Berdasarkan tukar pendapat yang pernah dilakukan dengan RKPD Magetan yang telah

mengadakan kerjasama dengan PT. KDS Malang, ternyata jam-jam siaran penerangan dan penyuluhan tidak mendapat alokasi waktu yang cukup karena dari pihak swasta menghendaki untuk dijual sebagai jam komersial. Akibatnya kepentingan RKPD sesuai misi utamanya banyak dikorbankan.

Sebenarnya, ide untuk kerjasama pengelolaan siaran dengan pihak swasta sudah pernah ditempuh, seperti mengajak kerjasama dengan PT. Bunaken Advertising Surabaya dan PT. KDS Malang. Setelah mereka melakukan survey ternyata semua gelombang siara radio di Surabaya baik itu frekwensi AM dan FM dapat diterima dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Akhirnya PT. Bunaken dan PT KDS Malang tidak berani meneruskan rencana kerjasama dan menyatakan mengundurkan diri, apalagi kecenderungan pemasang iklan/siaran niaga sekarang beralih ke media televisi swasta maupun media komersial yang lebih menjamin menjaring konsumen.

3. Mengenai kelanjutan Buletin "Mediatantra" yang dikelola Bagian Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat II Lamongan, sampai saat ini masih tetap berlangsung dan terus ditingkatkan kualitas mutu, isi dan bentuk penerbitanya. Khusus penerbitan edisi X dan XI saat ini masih dalam proses penyelesaian cetak.

## **XVIII. SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **SUB SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Mengenai permohonan penjelasan dari Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap sasaran dan bentuk kegiatan Proyek Peningkatan Kemampuan Hansip/Wankamra sebesar 15 Juta Rupiah adalah untuk membentuk kepribadian anggota Hansip yang mempunyai kecakapan, kemampuan dan kwalifikasi dalam :

- a. Kepemimpinan secara teknik dan mampu mengerahkan Satgas Hansip dalam kegiatan operasional Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- b. Memimpin pelaksanaan tugas pada setiap kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang ada di daerahnya masing-masing.
- c. Kemampuan mengemban hasil latihan untuk dikembangkan di daerahnya masing-masing.

Adapun kegiatannya berupa penataran yang diikuti oleh Kasatgas Hansip Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, untuk tahun 1997/1998 sebanyak 150 orang anggota Hansip selama 3 Hari.

2. Untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 1997 telah disiapkan tenaga Hansip guna Pengamanan Langsung (PAMSUNG) dan Pengamanan Tak Langsung (PAMTAKSUNG) sebanyak 12.675 orang anggota terdiri dari :
  - a. Hansip Linmas sebanyak 9.714 orang anggota.
  - b. Hansip Kamra sebanyak 2.811 orang anggota.
  - c. Hansip Wanra sebanyak 150 orang anggota.

Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.048 buah, Hansip Linmas yang disiapkan di masing-masing TPS sebanyak 2 orang dan Linmas sebagai pasukan cadangan yang dipersiapkan di Desa/Kecamatan.

3. Atas saran dan himbauan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan untuk mengendalikan kenakalan remaja agar tidak mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat Lamongan, disampaikan terima kasih. Eksekutif akan lebih mengefektifkan patroli malam secara instansional maupun gabungan guna menertibkan kenakalan remaja, bola sodok maupun warung dan kios yang menjual minuman keras.
4. Atas himbauan Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengajak semua pihak untuk bisa mengendali-

kan diri, agar hal-hal yang memungkinkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dihindari menjelang dan selama Pemilu serta menjelang dan selama Sidang Umum MPR yang akan datang, disampaikan terima kasih.

Hal tersebut sudah sejalan dengan keinginan Eksekutif baik melalui pembinaan-pembinaan yang bersifat pendekatan kepada masyarakat maupun secara kelembagaan.

## **XIX. SEKTOR LAIN-LAIN**

1. Atas Permohonan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang penyediaan Makam "TAMAN BAHAGIA" yang diperuntukkan bagi pejuang-pejuang pembangunan baik dari kalangan ABRI maupun Sipil, hal tersebut telah pula menjadi perhatian Eksekutif.

Adapun lokasinya direncanakan disekitar Taman Makan Pahlawan Kusuma Negara.

2. Himbauan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhadap pelaksanaan pengawasan proyek-proyek agar tetap dilaksanakan pengawasannya secara ketat, dapat disampaikan bahwa dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut tetap dilakukan sejak perencanaan sampai selesainya proyek, disamping itu dalam pengerjaan proyek tetap berpedoman pada RAB, Bestek, Gambar dan dengan memperhatikan kualitas proyek.

Pelaksanaan pengawasannya telah dilakukan dengan menempatkan petugas dari Dinas Tehnis yang selalu siap di lokasi proyek, disamping pengawas dari Tim Supervisi maupun pengawasan fungsional.

Adapun untuk lebih meningkatkan kebersihan lingkungan, peran serta masyarakat tetap diupayakan untuk ditingkatkan.

## PENUTUP

*Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan pihak Eksekutif yang dapat saya sampaikan secara rinci mencakup sektor-sektor yang telah disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat pada sidang Paripurna IV tahun sidang 1996-1997 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 17 Maret 1997 yang baru lalu.

Didalam jawaban yang telah tersurat itu tersirat pula makna, sikap dan harapan-harapan yang telah, sedang dan akan dilakukan pihak Eksekutif didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Lamongan ini, yang pada intinya mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta makin makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah Tingkat II Lamongan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Sudah barang tentu pihak Eksekutif di dalam memberikan tanggapan, jawaban dan penjelasan tadi telah berusaha sebaik-baiknya untuk dapat mencakup semua permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh Fraksi Dewan yang terhormat, namun demikian manakala dalam jawaban yang telah saya sampaikan itu dirasa masih terdapat hal-hal yang perlu diserasikan kiranya dapat diselesaikan melalui musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

Kiranya perlu difahami, bahwa penegasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, menghendaki kita semua untuk melestarikan mekanisme demokrasi Pancasila yang kita anut bersama-sama tumbuh dan berkembang didalam setiap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Didalam Demokrasi Pancasila yang memiliki norma-norma dasar dan asas-asas seperti yang terkandung didalam pembukaan serta batang tubuh Undang - undang Dasar 1945, hal ini berarti bahwa didalam melaksanakan kedaulatan rakyat harus didasarkan kepada "hikmat kebijaksanaan" yang merupakan perpaduan cipta, rasa dan karsa yang bersumber dari keseluruhan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga dengan demikian segala wujud yang dihasilkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pada akhirnya, saya serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Saudara Pimpinan Dewan Yang Terhormat untuk memperoleh tindak lanjut didalam pemrosesan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1997/1998.

Selanjutnya kepada segenap Anggota Dewan yang terhormat saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**



**R. MOHAMAD FARIED, SH.**